



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029



H. HERMAN DERU
GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. CIK UJANG
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN

“SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA”



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 013 / KEP / KES / II / 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENIMBANG : a. bahwa setiap program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan harus dapat diukur dan mempunyai indikator kinerja yang jelas dan mendapatkan informasi kinerja yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat Provinsi;

b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu disusun Indikator Kinerja Utama kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa untuk pengukuran dan indikator kinerja utama tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan;
- g. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- h. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- j. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- n. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan IKU di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
- q. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);

- r. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tentang **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kesehatan** di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan program dan upaya kesehatan yang dilaksanakan dan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai acuan ukuran kinerja bagi setiap bidang, UPT, Seksi dan unit lainnya dalam menyusun rencana kinerja tahunan dan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk memperoleh informasi kinerja yang penting.
- Keempat : Indikator Kinerja Utama yang disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.
- Kelima : Berbagai program dan upaya kesehatan lainnya yang perlu dilaksanakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nama Unit Organisasi
Tugas
Fungsi

- : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
: Melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi
:
1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;
6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup dan kesehatan penduduk suatu wilayah atau negara	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Lakip Provinsi / Laporan Tahunan BPS/ Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat	Kepala Dinas Kesehatan
		2 Prevalensi Stunting	Persen / %	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 SD b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore < -2,0 SD	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek / Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB) x 100%	Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
2	Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	3 Angka Kematian Ibu	/ 100.000 kelahiran hidup	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000 Kelahiran Hidup	Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan

		4	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen / %	Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.	Jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional *minimal 98% dari total penduduk	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen / %	Persentase fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) dengan akreditasi paripurna	Jumlah Fasilitas kesehatan (RS & Puskesmas) yang mendapatkan status akreditasi paripurna/ Jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi dikali 100%	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
		6	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen / %	Persentase kabupaten/kota yang memiliki fasilitas kesehatan primer (80% desa di kabupaten/kota memiliki setidaknya 1 Pustu dan 80% puskesmas di kabupaten/kota melayani ≤30 ribu penduduk atau jarak ≤120 menit) dan fasilitas kesehatan lanjutan (minimal 1 rumah sakit kelas C untuk setiap kabupaten/kota) sesuai kebutuhan	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki (RS & Puskesmas) sesuai standar dibagi Jumlah Kab / Kota dikali 100%	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
		7	Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi	Rasio	Rasio Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang tersedia terhadap jumlah penduduk	Jumlah Total tenaga kesehatan + medis (dokter, perawat dan bidan) yang teregistrasi dibagi total jumlah penduduk dikali 1.000	Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
		8	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen / %	Persentase fasilitas kesehatan (Puskesmas termasuk labkesmas, RS) yang secara konsisten mempertahankan tingkat kecukupan pasokan kesehatan esensial, termasuk diagnostik, reagen, obat-obatan, vaksin, sesuai dengan pedoman untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu	Jumlah fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar dibagi Jumlah total fasilitas kesehatan dikali 100%	Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Kefarmasian / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	9	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	Metode pengukuran kesejahteraan keluarga berdasarkan 12 indikator kunci yang mencakup aspek kesehatan, lingkungan, dan kepesertaan JKN, dihitung dari persentase indikator yang terpenuhi (jumlah indikator terpenuhi dibagi total indikator), dengan tujuan menilai kualitas hidup keluarga dan memberikan intervensi tepat sasaran, menghasilkan nilai IKS dari 0-1, yang dikategorikan menjadi keluarga sehat (>0,8), pra sehat (0,5 - 0,8) dan tidak sehat (<0,5)	Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1 dibagi 12 - Jumlah Indikator yang tidak ada di keluarga	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Kepala Dinas Kesehatan

Palembang, 28 September 2025
 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Sumatera Selatan

 dr. H. Trisnawarman, M. Kes, Sp.KKLP
 Pembina Utama Muda / IV, e
 NIP. 19660909 200604 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126
Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselfprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 016/SK/DINKES/2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- e. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 ;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
- p. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
- q. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 28 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trishawarman, M. Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196609092006041008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang sebagai laporan;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN**

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch. Hoesin Palembang 30126

Telp. (0711) 354915 Fax (0711) 351749 – 321707

Web: dinkes.provsumsel.go.id, Email : office.admin@ppid-dinkes.sumselfprov.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025
NOMOR : 006 / SK / KES / II / 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2025 – 2029 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS KESEHATAN SUMATERA SELATAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan Penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2025 – 2029 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuknya Tim Penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan 2025 – 2029;
- b. Bahwa Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- MENGINGAT** : a. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- c. UU Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- i. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 - o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
 - p. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
 - q. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 62);
 - r. Keputusan Gubernur Nomor 460/KPTS/DPPA/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Menunjukkan Personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Renstrakes Tahun 2025 - 2029 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025
 - Kedua : Kepada Personil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung

jawab sebagai Tim Penyusun Renstrakes 2025 - 2029.

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2029.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan nya sampai dengan berakhirnya Tahun anggaran 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan

The image shows a circular official stamp of the Provincial Health Office of South Sumatra. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN' around the top and 'DINAS KESEHATAN SUMATERA SELATAN' around the bottom. In the center is a smaller emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 006 /SK/KES/II/2025
Tanggal : 21 April 2025

Tim Penyusun Renstrakes Tahun 2025 - 2029
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

- Pengarah : Kepala Dinas
- Ketua : Sekretaris Dinas
- Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 6. Kepala Subbagian Keuangan
 7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 8. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 9. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 10. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 11. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 12. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 13. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 14. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 15. Kepala Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi
 16. Kepala Seksi Kefarmasian
 17. Kepala Seksi Alat Kesehatan
 18. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 19. Kepala Bapelkes
 20. Kepala Tata Usaha Bapelkes
 21. Ns. Syahril Gunawan, S. Kep, M. Kep
 22. Anita Riantina, SKM
 23. Rismawati, SKM, M. Kes
 24. Yulianti Veranita, SKM, MKM
 25. Roslinawati, S. Kep, M. Kes
 26. Saiban, SKM
 27. Elya, SKM, MPH
 28. Rini Oktarina, SKM, MKM
 29. Fitri Mawarti, SKM, MKM
 30. Pauline Bediawati, SKM
 31. Rosida, S. Kep

32. Nurfitri, SKM
33. Doni Wijaya, SKM, M. Si
34. Robiatul Adawiyah, S.ST, M. Kes
35. Angga Dwi Nova Riezka, SKM
36. Iku Girihendari, SKM
37. Ria Irma Sari, SE, M. Si
38. Sevni Velanika, SKM
39. Sari Apriany, S.S.T

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 April 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat dan Karunia dari Allah SWT dan dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2025 - 2029, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 - 2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Sumatera Selatan, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Disadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini dimungkinkan ada kekurangan dan keterbatasan, maka apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang dibangun dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Palembang, 29 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, Sp.KKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	9
2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	9
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	69
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	70
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	70
2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	71
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	71
2.2.2 Isu Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	76

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	81
3.1	Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029	81
3.2	Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029	81
3.3	Cascading Kinerja Dinas Kesehatan	84
3.4	Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029	89
3.5	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029	94
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	96
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	96
4.2	Uraian Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	124
4.3	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	149
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	153
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	169
BAB V	PENUTUP	184

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	19
Tabel 2.4	Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	22
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	23
Tabel 2.6	Proporsi Anggaran Kesehatan Tahun 2019 – 2024	49
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021– 2024	51
Tabel 2.8	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	71
Tabel 2.9	Isu Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029	77
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030	83
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 -2029	89
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029	90
Tabel 3.4	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 -2029	94
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	100
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030	124
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	152
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2030	153
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030	169

DAFTAR GRAFIK

		HAL
Grafik 2.1	Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	25
Grafik 2.2	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana di Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2024	28
Grafik 2.3	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	28
Grafik 2.4	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	30
Grafik 2.5	Persentase Stunting pada Anak Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	31
Grafik 2.6	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	34
Grafik 2.7	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024	35
Grafik 2.8	Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024	36
Grafik 2.9	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024	38
Grafik 2.10	Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar (9) Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 – 2024	39
Grafik 2.11	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 – 2024	41
Grafik 2.12	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024	43
Grafik 2.13	Treatment Coverage TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 s/d 2024	46
Grafik 2.14	Treatment Succes Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 s/d 2024	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan Daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram. Pembangunan Daerah juga memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H, perlu disusun rencana strategi yang berisi tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD serta target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.

Rencana Strategi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur terpilih yaitu **H. Herman Deru** dan Wakil Gubernur terpilih **H. Cik Ujang**, yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu “**SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA**”, arti dari visi tersebut adalah : 1) **Sumsel** memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada tahun 2024 penduduk provinsi ini berjumlah 8.837 (ribu) jiwa, 2) **Maju** bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan, 3) **Terus** bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, 4) **Semua** mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah. Dan dengan **misi daerah** sebagai berikut: 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang **berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban** melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing, 2) Mewujudkan **ketahanan ekonomi** berbasis sumber daya local dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi **kerakyatan** yang **berkeadilan** untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara **ketahanan pangan, ketahanan energi** dan **kedaulatan air** sebagai Upaya mengatasi **perubahan iklim**, 4) Meningkatkan Pembangunan **infrastruktur** yang **terintegrasi** antar Kabupaten/Kota dan **pelayanan dasar**

yang **berkualitas** dan ramah lingkungan, 5) **Memperluas kesempatan berusaha** dan **lapangan kerja** serta **perlindungan social** yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan, 6) Meningkatkan penyelenggaraan **tata Kelola pemerintahan** yang baik **berbasis digital** menuju **pelayanan public** yang berkualitas dan 7) Mewujudkan kehidupan **beragama, seni** dan **budaya** dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada **kearifan lokal** . Dari ketujuh misi tersebut misi pertama terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan.

Untuk mencapai visi dan misi daerah Sumatera Selatan tersebut, Dinas Kesehatan dituntut untuk menjabarkan pencapaian visi dan misi tersebut kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan bidang kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan termasuk seluruh UPTD, dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Lima pendekatan perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- (1) Pendekatan politik, dengan menyelaraskan program kepala Daerah.
- (2) Pendekatan teknokratik, Artinya Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
- (4) Pendekatan atas-bawah (*top-down*), dan
- (5) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada

penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penyusunan rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- 1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 2) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, strategi, program dan kegiatan daerah. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Pertanggung jawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra. Renstra tersebut harus dibuat 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- 7) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Nomor. 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 14) Peraturan Gubernur Nomor. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Prov. Sumsel;
- 15) Keputusan Gubernur Nomor. 614/KPTS/BPP – PA/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi. Sumatera Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan selama periode 5 (lima) tahun ke depan terutama bagi pemerintah daerah, *Stakeholder*, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh tentang potensi dan kondisi Sumatera Selatan saat ini, meliputi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Potensi dan kondisi derajat kesehatan Sumatera Selatan saat ini ditelaah secara seksama dan mendalam melalui evaluasi, analisis, dan interpretasi (dengan analisis SWOT) agar dapat diidentifikasi masalah-masalah kritis (*critical issues*) yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan. Bertitik tolak dari hal ini maka perlu diupayakan dan dikembangkan alternatif penyelesaian yang memungkinkan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Oleh sebab itu upaya merealisasikan Renstra Pembangunan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, sudah seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab sinergis antara sektor dan didukung dengan kerjasama sinergis antar daerah kabupaten/kota.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah (5 tahun) yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan merupakan penjabaran dari Renstra Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk kegiatan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian setiap dan semua kegiatan pembangunan diharapkan dapat terselenggara secara sinergis, terkoordinasi dengan baik merupakan bagian integral dari Renstra ini, dapat dilaksanakan dengan kemampuan dana yang tersedia, serta sesuai dengan kondisi dan situasi lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.2.2 Isu Strategis

Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.3 Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Bab V. Penutup

Lampiran - Lampiran

- 1. Matriks Indikator Kinerja Utama
- 2. Matriks Target Kinerja
- 3. Matriks Alokasi Pendanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan :

- a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- c. Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 5) Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumbser Daya Kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretariat, bidang, subbagian dan seksi sebagai berikut :

- a. Sekretariat
 - 1) Tugas Pokok

Merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

2) Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- g. Pelaksanaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, dan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Bidang Kesehatan Masyarakat

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga, gisi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta NAPZA dan bencana.

2) Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);

- b. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi wabah bencana, KLB, karantina dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta upaya kesehatan jiwa, Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan

1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu serta akreditasi.

2) Fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi;

- b. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan serta fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- 1) Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.
 - 2) Fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS

dr. H. TRISNAWARMAN, M.Kes,SpKKLP
PEMBINA TK. II/IV/c
NIP. 196609092006041008

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2017
TANGGAL : 24 Oktober 2017

SEKRETARIS

H. FERY FAHRIZAL, SKM,M.KM
NIP. 196802191990031001 (IV/b)

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

**KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

EKA ASHARI, SKM., M.Kes
NIP. 198201122005011004 (IV/a)

**KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN**

SUCIATI, SE, M.Si
NIP. 196902031992032 005 (IV/a)

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

EDWIN YULIUS, SKM., M.Si
NIP. 196907231993031 003 (IV/a)

**KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT**

DEDY IRAWAN, SKM., M.KM.
NIP. 198202152005011003 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

IRA PRIMADESA OGATIAH, S.Si., M.Kes.
NIP. 197412182003122004 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN**

dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.
NIP. 197604062009022004 (IV/b)

**KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA KESEHATAN**

dr. ICON HARIZON, M.K.M.
NIP. 198407032009021004 (IV/b)

**KEPALA SEKSI
KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
MASYARAKAT**

dr. LISA MARNIYATI, M.KM.
NIP. 198203102006042008 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
SURVEILANS DAN IMUNISASI**

Ns. H. DARSONO, S.Kep., M.Kes
NIP. 197512091995031001 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN
TRADISIONAL**

dr. UKE VERONIKA
NIP. 197802232006042012 (III/d)

**KEPALA SEKSI
KEFARMASIAN**

INDRA GUNAWAN, SKM., M.Si
NIP. 197208241996031003 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes.
NIP. 197610071996031001 (IV/a)

**Plt. KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR**

MARSAL HUSNAN, SKM., M.Kes
NIP.198109092009021003 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM., M.Kes
NIP. 198102272005011005 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
ALAT KESEHATAN**

TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si.
NIP. 197406061998032003 (IV/a)

**Plt. KEPALA SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN
KERJA DAN OLAHRAGA**

HERMANSYAH, SKM.
NIP. 196807111992031005 (III/d)

**KEPALA SEKSI
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN
JIWA**

dr. Hj. SARI NAZLIYATI PUTR, M.K.M
NIP. 198306292010012015 (IV/a)

**KEPALA SEKSI
FASYANKES DAN MUTU AKREDITASI**

SARI APRIYANI, S.Kep., M.Kes
NIP. 198204042009022011 (III/c)

**KEPALA SEKSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M.
NIP. 197506061999032002 (IV/a)

**UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DINAS**



dr. H. TRISNAWARMAN, M.Kes,SpKKLP
PEMBINA TK. II/IV/c

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD sampai akhir tahun 2024 sebanyak 1.423 orang. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Institusi	Golongan Kepegawaian																Jumlah	
		Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Gol. I		X		IX		VII		VIII			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Dinas Kesehatan	21	33	28	124	6	18	0	0	0	1	2	3	2	3	0	0	59	182
2	Bapelkes	2	8	5	15	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23
3	RS. Ernaldi Bahar	18	68	35	113	15	36	0	0	2	4	8	2	1	15	0	0	79	238
4	RSK Mata Masyarakat	4	8	5	62	9	20	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	18	98
5	RSK Gigi dan Mulut	2	13	6	49	9	24	0	0	0	5	0	1	4	24	0	0	21	116
6	RSUD Siti Fatimah	15	38	49	140	22	65	0	0	18	62	1	25	36	105	1	0	142	435
TOTAL		62	168	128	503	65	163	2	0	20	72	11	31	43	151	1	0	331	1092
SUB TOTAL																		1423	

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD Dinas (UPTD) berdasarkan golongan, terbanyak adalah golongan III sebanyak 631 orang atau sebesar 57,89%, kemudian golongan IV sebesar 21,10% (230 orang), golongan II sebesar 20,92% (228 orang) dan golongan I sebesar 0,18% (2 orang).tapi dilihat dari responsive gender jumlah perempuan lebih banyak dari laki- laki seperti dari keseluruhan Gol. III jumlah perempuan lebih banyak 503 orang (79,71%) sedangkan laki – laki sebanyak 128 orang (20,29%) dan Gol. IV perempuan lebih banyak sebanyak 168 orang (73,04%) sedangkan laki- laki 62 orang (26,95%).

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Institusi	Tingkat Pendidikan														Jumlah	
		S3 / S2		S1		D4		D3		SLTA		SLTP					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Dinas Kesehatan	28	58	17	82	0	3	7	39	7	0	0	0	59	182		
2	Bapelkes	2	16	1	3	0	1	0	0	2	0	4	0	16	19		
3	RSK. Ernaldi Bahar	17	46	30	103	3	8	20	80	9	1	0	0	79	238		
4	RSK Mata Masyarakat	3	13	5	39	1	3	7	35	2	0	0	0	18	98		
5	RSK Gigi dan Mulut	0	11	5	44	1	0	14	61	1	0	0	0	21	116		
6	RSUD Siti Fatimah	26	69	33	119	1	0	81	237	1	1	0	0	142	435		
TOTAL		76	213	78	311	3	24	68	285	38	2	4	0	335	1088		
SUB TOTAL														1423			

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Sebagian besar pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD berlatar belakang pendidikan Sarjana S 1 (389 orang) atau sekitar 35,69%, Diploma 3 sebesar 32,39% (353 orang), S3/S2 sebesar 26,51% (289 orang), SMA sebesar 3,67% (40 orang), Diploma 4 sebesar 2,48% (27 orang) tapi dilihat dari responsive gender jumlah perempuan lebih banyak dari laki – laki terlihat Sarjana S1 perempuan sebanyak 311 orang (79,95%) dibandingkan laki-laki 78 orang (20,05%), Diploma 3 perempuan sebanyak 285 orang (80,74%) dibandingkan laki-laki sebanyak 68 orang (19,26%)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2017 bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membawahi Kelompok Jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional Khusus dan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Jabatan	Dinkes		Bapelkes		RSK Mata Masyarakat		RSK Gigi dan Mulut		RSUD Siti Fatimah		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A	FUNGSIONAL KHUSUS												
1	Dokter Spesialis	0	0	0	0	2	6	0	2	7	22	9	30
2	Dokter	1	10	0	0	1	6	1	8	13	35	16	59
3	Dokter Gigi	1	0	0	0	0	0	1	16	0	3	2	19
4	Dokter Gigi Spesialis	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
5	Perawat	0	25	0	0	7	48	7	23	69	193	83	289
6	Perawat Gigi	1	2	0	0	0	0	4	28	1	3	6	33
7	Bidan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	33	0	35
8	Penyuluh Kesehatan	6	10	0	0	0	1	1	2	0	7	7	20
9	Sanitarian	2	2	0	0	0	1	0	2	1	4	3	9
10	Epidemiologi	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11
11	Administrator Kesehatan	5	43	0	6	0	2	0	6	1	14	6	71
12	Pranata Laboratorium	1	0	0	0	0	4	1	1	3	15	5	20
13	Apoteker	0	1	0	0	1	2	1	4	3	14	5	21
14	Asisten Apoteker	1	10	0	0	0	2	0	6	4	24	5	42
15	Refrak Option	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4
16	Fisioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	3
17	Nutrisionis	1	4	0	0	0	1	0	3	1	13	2	21
18	Elekromedik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rekam Medik	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	1	11
20	Radiografer	0	0	0	0	0	0	1	3	4	10	5	13

No	Jabatan	Dinkes		Bapelkes		RSK Mata Masyarakat		RSK Gigi dan Mulut		RSUD Siti Fatimah		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
21	Widyaiswara	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	3
22	Pustakawan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
23	Penyuluh Kesehatan Kerja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
24	Analisis Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
25	Psikologi Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
26	Entomolog	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
27	Anastesi	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
28	Asisten Anastesi	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	1
29	Arsiparis	0	0	0	0					1	1	1	1
30	Terapi Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	Okupasi Terapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
B	FUNGSIONAL UMUM	24	45	9	10	5	11	0	2	16	9	54	77
C	STRUKTURAL (ESELON)	12	9	1	3	2	2	1	2	17	15	33	31
TOTAL		60	176	12	23	18	90	19	118	148	429	257	836

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Kelompok Jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: fungsional khusus dan fungsional umum. Pegawai fungsional khusus sebanyak 898 orang dengan 31 kriteria jabatan fungsional khusus. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 131 orang. Selain jabatan fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD memiliki 64 pejabat struktural.

Jabatan fungsional khusus yang banyak terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD antara lain perawat 372 orang (41,43%), administrator kesehatan 77 orang (8,57%) dan dokter 75 orang (8,35%), tapi dari responsive gender perempuan lebih banyak dari laki-laki yaitu perempuan 728 orang (81,07%) dibandingkan laki-laki 170 orang (18,93%). Dengan lebih banyak perawat perempuan sebanyak 289 orang (77,69%) dibanding laki-laki sebanyak 83 orang (22,31%), fungsional umum perempuan sebanyak 77 orang (58,78%) dibanding laki-laki sebanyak 54 orang (41,22%) dan administrator kesehatan perempuan sebanyak 71 orang (92,21%) dibandingkan laki-laki sebanyak 6 orang (7,79%).

2.1.2.2 Aset dan Modal

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan memiliki aset berupa tanah, Gedung, serta peralatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

KODE	NAMA BARANG		NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP		3.095.541.283.914,98
1	TANAH		846.531.251.665,39
101	TANAH		846.531.251.665,39
2	PERALATAN DAN MESIN		949.381.392.553,32
2.01	ALAT BESAR		10.946.469.593,40
2.02	ALAT ANGKUTAN		52.547.522.385,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		8.675.337.884,80
2.04	ALAT PERTANIAN		1.766.659.196,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		134.011.959.027,82
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		9.573.987.102,94
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		644.531.307.954,01
2.08	ALAT LABORATORIUM		42.197.840.269,52
2.09	ALAT PERSENJAAN		87.926.600,00
2.10	KOMPUTER		33.599.979.909,84
2.11	ALAT EKSPLORASI		0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN		0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA		5.415.194.897,00
2.16	ALAT PERAGA		0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		11.855.83,00
2.18	RAMBU - RAMBU		58.010.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA		957.342.600,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		1.124.002.497.215,28
3.01	BANGUNAN GEDUNG		1.111.427.956.418,82
3.02	MONUMEN		0,00
3.03	BANGUNAN MENARA		7.298.037.500,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		5.281.503.30146
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		38.750.488.320,11
4.01	JALAN DAN JEMBATAN		91.064.000,00
4.02	BANGUNAN AIR		349.236.600,00
4.03	INSTALASI		10.886.821.745,00
4.04	JARINGAN		27.423.365.975,11
5	ASET TETAP LAINNYA		29.935.840,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN		29.935.840,00
5.02	BARANG BERCORAK Kesenian/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA		0,00
5.03	HEWAN		0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN		0,00
5.05	TANAMAN		0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		136.845.718.320,88
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		136.845.718.320,88
1.5	ASET LAINNYA		23.692.475.553,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		0,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD		19.992.480.553,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD		19.992.480.553,00
4	ASET LAIN-LAIN		3.699.995.000,00
4.01	ASET LAIN-LAIN		3.699.995.000,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selama 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

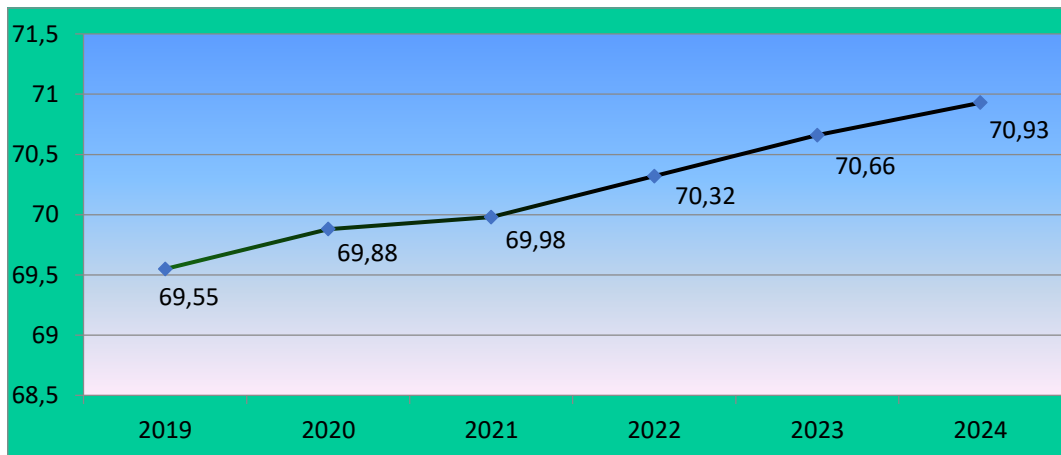
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup	69,52	69,63	69,75	69,86	69,98	70,1	69,55	69,88	69,98	70,32	70,66	70,93	100,04	100,36	100,33	100,66	100,97	101,18
2	Persentase kegiatan penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Kematian Ibu	118	116	114	112	110	131	105	128	131	97	106	107	111,02	89,66	85,09	113,39	103,64	118,32
4	Jumlah Kematian Bayi	477	458	438	495	475	502	509	536	502	497	666	656	93,29	82,97	85,39	99,60	59,79	69,32
5	Prevalensi Stunting pada Balita	30	29	28	24,5	22,5	14	28,98	29,8	24,8	18,6	20,3		103,52	97,32	111,43	124,08	109,78	
6	Persentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (9) jenis tenaga kesehatan	40	45	50	55	60	83	37,87	33,82	35,07	48,27	47,7	58	94,68	75,16	70,14	87,63	79,5	69,88
7	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Sesuai Kebutuhan	100	100	100	100	100	100	87	86	84	98	87,8	90	87	86	84	98	87,8	90
8	Persentase rumah tangga ber PHBS	60	65	70	75	80	66	66,18	65,33	66,75	68,29	77,34	77,05	110,3	100,50	95,35	91,05	96,68	116,74

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -						Realisasi Capaian Tahun Ke -						Rasio Capaian pada Tahun Ke -					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,96	0,98	0,102	0,106	0,108	1,09	0,94	0,95	0,96	1,03	1,03	1,12	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	80	85	90	93	95	92	76,3	80	85,2	89,47	97,23	98,54	95,38	94,12	94,67	96,20	102,34	107,11
14	Treatment Coverage TBC	50	55	60	65	70	90	67	30,29	41,41	53,04	62,3	63,21	134	55,07	69,02	81,6	89	70,23
15	Treatment Succes Rate tuberkulosis	85	86	87	88	90	90	95	94	90	91	90,95	88,43	111,76	109,30	103,44	103,41	101,05	98,26

2.1.3.2 Angka Harapan Hidup

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber : Seksi Kesga & Gizi Masyarakat Dinkes Tahun 2024

Angka harapan hidup di provinsi Sumatera Selatan dalam enam tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,55 tahun, naik menjadi 69,88 pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 69,98 tahun pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 70,32 tahun pada tahun 2022 kemudian terus naik menjadi 70,66 tahun pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 70,93. Bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk hidup hingga 70,93 tahun, lebih lama 0,27 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Selama periode 2019 hingga 2024, angka harapan hidup di Sumatera Selatan telah meningkat sebesar 1,38 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 point per tahun.



Faktor-faktor penghambat peningkatan angka harapan hidup di Sumatera Selatan antara lain :

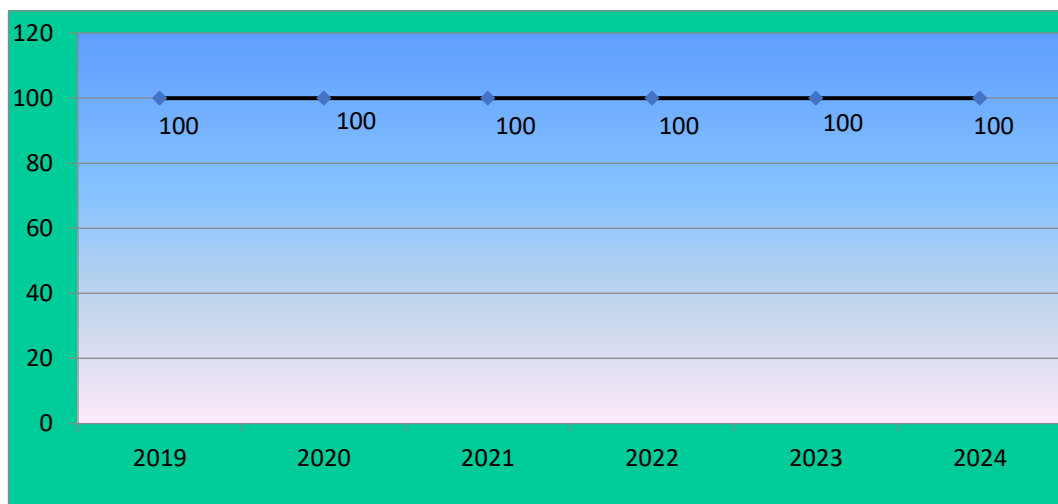
1. Masih tingginya jumlah kematian ibu melahirkan yang disebabkan karena masih dibawah target kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan pelayanan kesehatan ibu nifas di kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
2. Masih tingginya jumlah kematian bayi yang disebabkan karena belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir di kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
3. Prevalensi Balita stunting yang masih cukup tinggi dikarenakan masih belum optimalnya penanganan masalah gizi pada kegiatan bersifat sensitif yang melibatkan lintas sektor.
4. *Triple burden of disease*, yaitu belum tuntasnya penanganan penyakit-penyakit menular klasik seperti : TBC, Campak, Polio, Kusta ditambah dengan semakin meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular seperti : Diabetes Mellitus, Penyakit Jantung Koroner, Stroke dan Kanker dan adanya penyakit *re-emerging disease* (penyakit infeksi emerging) yaitu munculnya penyakit infeksi baru atau penyakit yang pernah menghilang namun muncul lagi seperti : Mpox (Monkeypox), COVID-19, AI (H5N1), Demam Rift Valley, Polio, Legionellosis, Listeriosis, dan Meningitis Meningokokus.
5. Disparitas sarana pelayanan kesehatan dimana daerah perkotaan memiliki sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih lengkap dibandingkan dengan kabupaten.
6. Jumlah tenaga kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di setiap kabupaten/kota.
7. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
8. Akses sanitasi dan air bersih masyarakat yang belum optimal.
9. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat masih rendah.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan prima yang sesuai standar melalui akreditasi Puskesmas dan akreditasi rumah sakit.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas serta Posyandu.
3. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui penerimaan formasi CPNS, PPPK dan pemerataan SDM Kesehatan di kabupaten/kota
4. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui Pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis.
5. Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui program PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional).
7. Pengentasan masalah stunting, gizi buruk dan kurang gizi melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan melibatkan seluruh lintas sektor terkait.
8. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, sanitasi, jamban, rumah tangga sehat, dan peningkatan akses terhadap air bersih
9. Desa siaga aktif adalah karena tingginya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat dalam bidang Kesehatan
10. Mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pembudayaan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) / Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat.

2.1.3.3 Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Terlaksana

Grafik 2.2 Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana di Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2024

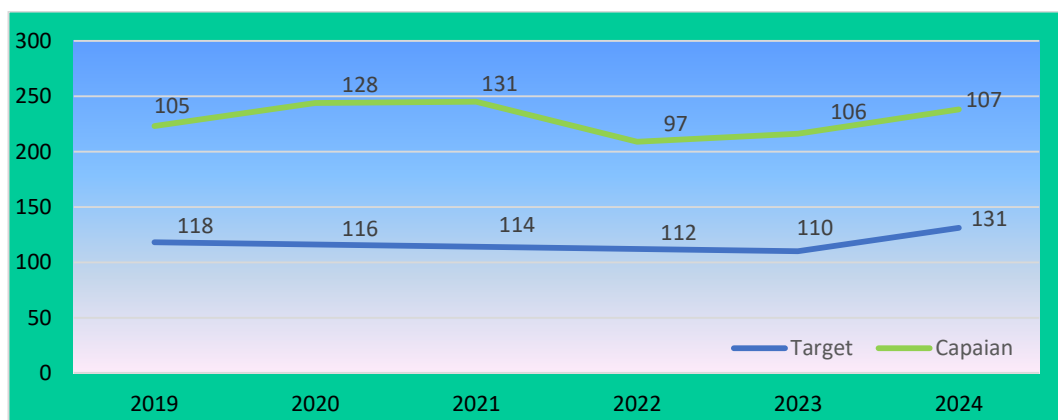


Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Tahun 2024

Jika dilihat dalam 6 tahun terakhir Persentase kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terlaksana sudah mencapai 100%, berarti sesuai target yang diinginkan.

2.1.3.4 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Grafik 2.3 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber : Seksi Kesga & Gizi Masyarakat Dinkes Tahun 2024

Jumlah kematian ibu melahirkan mengalami fluktuatif dari 105 kasus pada tahun 2019 menjadi 128 kasus pada tahun 2020, namun sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 131 kasus tapi pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 97 kasus dan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 106 kasus kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 sebanyak 107 kasus kematian ibu melahirkan. Jika dibandingkan dengan target Renstra rasio capaian jumlah kematian ibu melahirkan pada tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan dengan rasio capaian pada tahun 2024 sebesar 118,32%.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus kematian ibu yaitu sosialisasi akan pentingnya ANC secara rutin untuk ibu hamil, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti keluarga pasien



mengenai keadaan pasien, menyusun rekomendasi dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan/ pemerataan sebaran tenaga kesehatan, pembinaan kepada tenaga kesehatan yang masih melakukan pertolongan persalinan di non fasilitas kesehatan, menindaklanjuti

tempat praktek yang belum berizin dan juga meningkatkan kemitraan dengan tokoh masyarakat yang dapat mendukung persalinan di fasilitas kesehatan, menyusun/mengupdate pedoman pelayanan kesehatan ibu dan BBL di masa pandemi covid dan terus menerus mensosialisasikannya, mendorong kabupaten/kota untuk mengusulkan pengadaan USG melalui permintaan ke Kemenkes maupun pengadaan melalui dana APBD Kab/Kota.

2.1.3.5 Jumlah Kematian Bayi

Grafik 2.4 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024



Sumber : Seksi Kesga & Gizi Masyarakat Dinkes Tahun 2024

Jumlah kematian bayi usia 28 hari – 11 bulan terus mengalami fluktuatif dalam 6 tahun terakhir dari 509 kasus kematian bayi pada tahun 2019 menjadi 656 kasus pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target Renstra maka jumlah kematian bayi belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan rasio capaian sebesar 69,32%. Belum tercapainya indikator ini dikarenakan masih ada persalinan yang dilakukan tidak di fasyankes masih ada pertolongan persalinan bukan oleh tenaga kesehatan, masih ada Fasyankes belum memiliki kelengkapan SDM, ruangan, alat kesehatan untuk siap menerima persalinan 24 jam, Masih ada penolakan rujukan dari ibu bersalin dan keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit.



Upaya yang dilakukan dalam menurunkan kematian bayi antara lain:

- Meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam upaya pertolongan persalinan di fasyankes;
- Pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan yang masih melakukan pertolongan persalinan di Non Fasyankes
- Meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan program kesehatan maternal dan neonatal;
- Meningkatkan advokasi dengan pemangku kebijakan dalam pelaksanaan Stiker P4K dan Kelas Ibu;
- Pertemuan penguatan peran LP/LS dalam pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) dan
- Meningkatkan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan.

2.1.3.6 Persentase Stunting pada Anak Balita

Grafik 2.5 Persentase Stunting pada Anak Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber : Seksi Kesga & Gizi Masyarakat Dinkes Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas mengalami fluaktif kasus stunting pada anak balita dari tahun 2019 sebesar 28,98%, naik pada tahun 2020

sebesar 29,8% kemudian turun menjadi 24,8% pada tahun 2021 turun lagi pada tahun 2022 menjadi 18,6% tapi naik pada tahun 2023 sebesar 20,3% dan turun lagi pada tahun 2024 sebesar 15,9% dan kurang mencapai target Renstra 2024 sebesar 14%. Dan persentase stunting secara nasional naik sebesar 30,8% (Risksdas 2018) maka persentase stunting di Sumatera Selatan pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan persentase stunting nasional sebesar 19,8%.

Penyebab Kasus Stunting tinggi dikarenakan :

1. Kurangnya akses ke makanan bergizi.
2. Kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil dan anak saat masa pertumbuhan.
3. Angka kunjungan balita ke Posyandu masih rendah.
4. Kunjungan ibu hamil untuk ANC ke Puskesmas kurang optimal; pemeriksaan, Tekanan Darah bumil, edukasi; resiko BBLR, PBLR dan Prematur.
5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi serta jamban.
6. Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, saat dan setelah kehamilan mempengaruhi pertumbuhan janin.
7. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan saat kehamilan.
8. Kehamilan yang tidak disadari atau terlambat disadari.



Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk Masalah Gizi

Berbagai Upaya yang telah dilakukan dalam Penanggulangan Stunting yaitu :

1. Total Anggaran Stunting Tahun 2024 sebesar Rp195.822.238.513,-, dengan anggaran Stunting yang langsung ke Bayi, Balita dan ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar Rp 80.013.881.655,-.

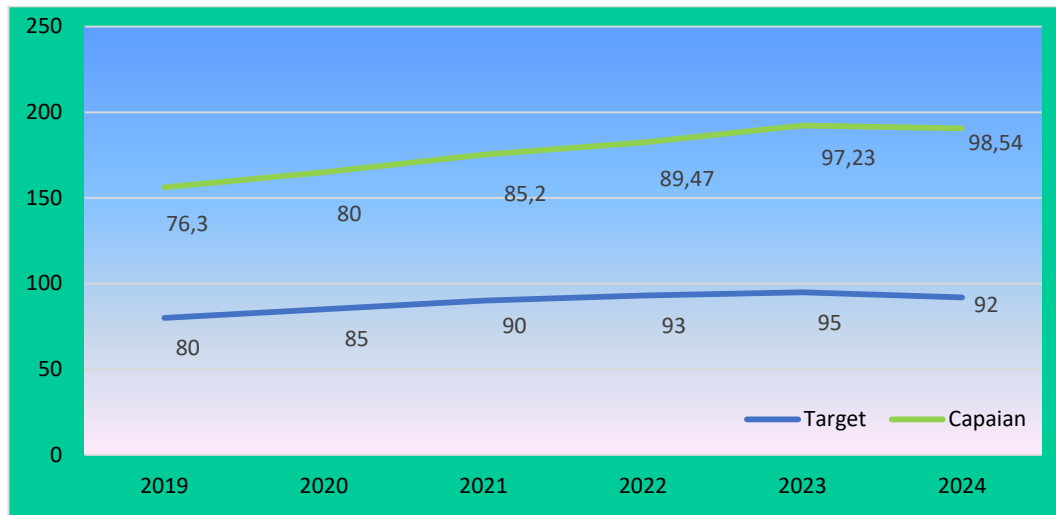
2. Intervensi bagi bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan. Jumlah Ibu Hamil KEK sebanyak 8.542 bumil dan yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 8.010 bumil (93,8%).
3. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil, dari jumlah 109.526 Ibu hamil, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet sampai bulan ini sebanyak 103.367 orang (94,38%).
4. Pengadaan Tabel Tambah Darah bagi Remaja Putri, dari jumlah 430.427 remaja putri, yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah lengkap sebanyak 362.764 orang (73,5%).
5. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk, dari jumlah kasus gizi buruk sebanyak 233 balita, sebanyak 224 balita (96,1%) mendapat pelayanan tata laksana gizi.
6. Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
7. Penyediaan Alat Antropometri Kit di Posyandu Pengadaan alat antropometri kit sebanyak 460 unit melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan bagi Posyandu yang belum memiliki alat Antropometri Kit atau Posyandu yang alat Antropometri Kit belum standar.
8. Kemitraan bersama BKKBN Perwakilan Sumsel dengan pemanfaatan data e-PPGBM Dinas Kesehatan.

Upaya yang akan dilakukan dalam penanggulangan stunting :

1. Pemberian makanan tambahan dan layanan kesehatan bayi/Balita yang bermasalah gizi dan ibu hamil Kurang Energi Kronis.
2. Pengadaan Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Remaja Putri.
3. Pelatihan Konseling Menyusui ASI eksklusif.
4. Pengadaan Vitamin dan Pelatihan Manajemen Tata Laksana Gizi Buruk.
5. Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan

2.1.3.7 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional

Grafik 2.6 Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024



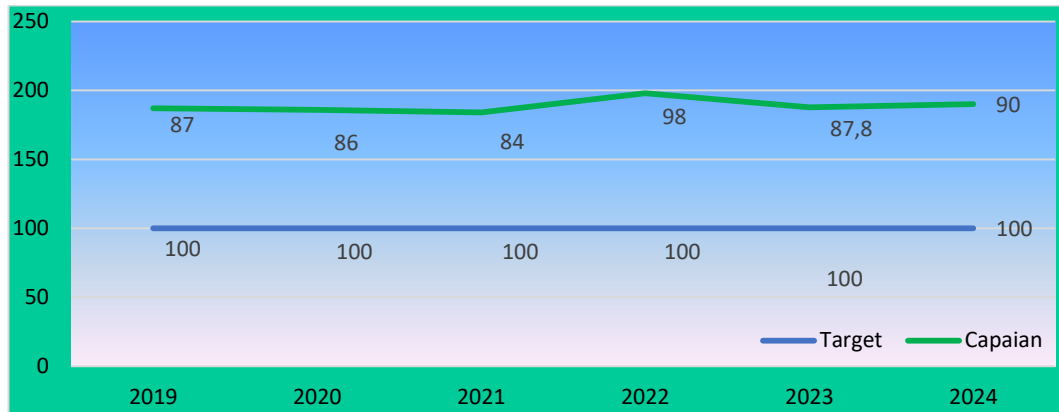
Sumber : Seksi Rujukan Tahun 2024

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional dalam kurun waktu 6 (enam) terakhir meningkat dari 76,3% pada tahun 2019 naik menjadi 80% pada tahun 2020 naik lagi pada tahun 2021 sebesar 85,2%, naik lagi menjadi 89,47% pada tahun 2022, naik lagi pada tahun 2023 sebesar 97,23% dan naik lagi pada tahun 2024 sebesar 98,54%. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Komitmen Pemda dalam hal pengalokasian anggaran jaminan kesehatan pada APBD ;
- Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumsel ;
- Target yang sudah ditetapkan dalam RPJMN.

2.1.3.8 Persentase ketersediaan obat dan Vaksin sesuai kebutuhan

Grafik 2.7 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin sesuai Kebutuhan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024



Sumber :Seksi Kefarmasian Dinkes 2024

Dilihat dari 6 (enam) tahun terakhir ketersediaan obat dan vaksin mengalami fluaktif dari 87% pada tahun 2019 turun menjadi 86% pada tahun 2020 kemudian turun lagi pada tahun 2021 sebesar 84% tapi naik pada tahun 2022 sebesar 98% kemudian turun pada tahun 2023 sebesar 87,8% dan naik pada tahun 2024 sebesar 90%. Rendahnya ketersediaan obat dan vaksin sesuai kebutuhan yang tidak sesuai dengan target dikarenakan :

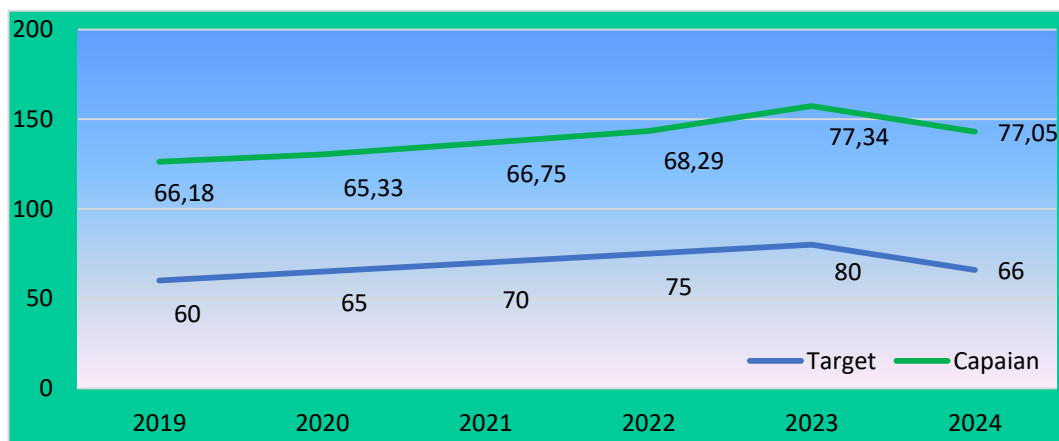
1. Penyampaian laporan bulanan ke dinas kesehatan Kabupaten / Kota oleh Provinsi masih belum mengikuti petunjuk teknis pemantauan yang telah disusun dan disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan;
2. Jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di puskesmas masih terbatas;
3. Kesiapan dari penyedia obat untuk memenuhi kebutuhan obat di puskesmas tidak sesuai dengan rencana kebutuhan.
4. Ketersediaan obat kosong pada Platform Ekatalog karena terkendala perpanjangan izin edar, kesulitan bahan baku, obat tersedia ED pendek.

Upaya yang dilakukan :

1. Pemantapan sistem e-Logistik;
2. Membangun koordinasi yang lebih baik antara Pemda provinsi dan Pemda kabupaten/kota, dan puskesmas, khususnya terkait pelaporan data ketersediaan obat dan vaksin;
3. Membuat surat edaran dari Kadinkes Prov. Ke kab/kota untuk melaporkan ketersediaan obat di seluruh puskesmas dengan format yang baru;
4. Melakukan pembinaan dan pemberian *reward* kepada petugas atau pengelola data di Kabupaten/Kota (Khususnya puskesmas).

2.1.3.9 Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS

Grafik 2.8 Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024



Sumber : Seksi Promkes & Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS yang ada di Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari tahun 2019 sebesar 66,18%, turun pada tahun 2020 sebesar 65,33%, naik tahun 2021 sebesar 66,75%, naik lagi pada tahun 2022 sebesar 68,29% kemudian naik lagi tahun 2023 sebesar 77,34% tapi turun Tahun 2024 sebesar 77,05%, berarti pencapaiannya sudah melebihi dari target yang ditetapkan 75%. Pencapaian yang tertinggi pada Kota Prabumulih sebesar 90,05%, Kab. Pali sebesar 90,04% dan pencapaian yang terendah pada Kab. Muratara

sebesar 51,37% dan Kab. Lahat sebesar 58,2%. Penyebab penurunan persentase rumah tangga ber-PHBS antara lain:

- a. Program PHBS tidak menjadi program prioritas kemenkes RI dan hanya beberapa kabupaten/kota yang menjadikan program PHBS sebagai salah satu indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Dukungan anggaran masih sangat terbatas bahkan di beberapa kabupaten/kota sama sekali tidak ada. Kondisi ini sangat miris mengingat data Rumah Tangga Ber PHBS diharapkan diperoleh melalui sistem survei yang mumpuni agar data yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya. Di seluruh kabupaten/kota tidak ada dukungan penganggaran terkait survei rumah tangga ber PHBS.
- c. Dukungan sarana dan prasarana promosi kesehatan sangat terbatas, baik di provinsi/kabupaten/kota utamanya dalam mendukung edukasi hidup sehat.
- d. Pelaksanaannya Germas masih sangat mengandalkan sektor kesehatan, dan dukungan lintas sektor masih terbatas.
- e. Masih ditemukan adanya ego program sehingga pelaksanaan Rumah Tangga ber PHBS mencakup 10 indikator dilapangan belum terintegrasi.



Pertemuan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan capaian Persentase rumah tangga ber-PHBS:

- a. Kebijakan terkait pembinaan PHBS ada (Permenkes No. 2269/Menkes/Per/XI/2011).

- b. Sudah ada dukungan sarana dan prasarana hanya saja belum cukup memadai dan perlu peremajaan agar lebih representatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan, seperti perlengkapan multimedia, kendaraan operasional khusus promosi kesehatan dan pameran, media elektronik maupun cetak, *infocus*, *microphone*, dan sebagainya.
- c. Germas menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Kesehatan RI yang saat ini lebih diarahkan pada “pemberdayaan hidup sehat” bisa menjadi salah satu pendorong dan pendukung pelaksanaan program PHBS dilapangan.
- d. Adanya koordinasi dan pembinaan komprehensif dengan pengelola program dan lintas sektor terkait program Rumah Tangga ber PHBS mencakup 10 indikator.

2.1.3.10 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Grafik 2.9 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 - 2024



Sumber : Seksi Rujukan Tahun 2024

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,94% sampai dengan tahun 2024 sebesar 1,12%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian tersebut sudah tercapai.

Upaya untuk meningkatkan daya tampung Rumah Sakit antara lain :

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui update Akreditasi Rumah Sakit.
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Pemenuhan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana di Rumah Sakit sesuai Standar.

2.1.3.11 Persentase Rumah Sakit Rujukan Propinsi yang Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi pada 6 (enam) tahun terakhir telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Sumatera Selatan hanya ada 1 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Rujukan Provinsi Siti Fatimah berdiri pada tahun 2017 dan terakreditasi pada tahun 2018 Rumah Sakit tersebut sudah terakreditasi dengan Status “Paripurna”.



2.1.3.12 Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar (9) Jenis Tenaga Kesehatan

Grafik 2.10 Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan sesuai Standar (9) Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 – 2024



Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluaktif dari tahun 2019 sebesar 37,37%, turun pada tahun 2020 sebesar 33,82% kemudian naik menjadi 35,07% pada tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 48,27% pada tahun 2022 tapi turun pada tahun 2023 sebesar 47,7% dan naik pada tahun 2024 menjadi 58%. Permasalahan yang terjadi pada tenaga Kesehatan di Puskesmas, antara lain:

- Kurangnya penyebaran distribusi tenaga Kesehatan di Puskesmas terutama daerah terpencil.
- Secara keseluruhan Puskesmas yang memenuhi keseluruhan tenaga kesehatan (9 tenaga kesehatan) pada Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 adalah tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), masih banyak puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga Kesehatan terutama tenaga dokter gigi yang belum terisi 126 orang/100.000 penduduk dan tenaga ATLM (Ahli Teknik Laboratorium Medis) yang belum terisi 33 orang/100.000 penduduk.

Upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Setiap Kabupaten/Kota Sudah mengusulkan kekurangan tersebut melalui Formasi Penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2024;
2. Perlu pemerataan dalam penyebaran distribusi tenaga Kesehatan di daerah terpencil khususnya Puskesmas dan jangan menumpuk di daerah Perkotaan;
3. Untuk pendataan yang lebih akurat kiranya seluruh Kab/ Kota baik di Dinas Kesehatan yang mencakup Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah untuk menyiapkan data yang dibutuhkan dengan pengisian secara online yang harus diupdate setiap saat;
4. Sosialisasi/Advokasi ke Kab/Kota terkait pemenuhan kebutuhan dokter dan dokter gigi melalui PGDS/LPDP;
5. Mengusulkan dokter/dokter gigi untuk mengikuti tugas belajar dengan pembiayaan LPDP Kemenkeu dan PGDS Kemenkes sesuai dengan usulan dari Kab/ Kota.

2.1.3.13 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi

Grafik 2.11 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 – 2024



Sumber : Seksi Surveilans & Imunisasi Tahun 2024

Tahun 2017 terdapat 44 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari suspek kasus campak 15 kali, Keracunan makanan 15 kali, Tetanus Neonatorum 5 kali, Diphteri 2 kali, Pertusis 2 kali, Rabies 2 kali dan Mers CoV 1 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Januari sebanyak 7 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2017 sebanyak 796 orang dan meninggal 3 orang.

Tahun 2018 terdapat 26 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari suspek kasus campak 5 kali, Keracunan makanan 10 kali, Tetanus Neonatorum 3 kali, Diphteri 5 kali, Pertusis 1 kali, Rubella 1 kali dan Hepatitis A 1 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Januari sebanyak 4 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2018 sebanyak 796 orang dan meninggal 3 orang.

Tahun 2019 terdapat 42 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari suspek kasus campak 2 kali, Keracunan makanan 9 kali, Tetanus Neonatorum 4 kali, Diphteri 4 kali, Pertusis 21 kali, Hepatitis A 1 kali dan Chikungunya 1 kali. Frekuensi KLB yang

tertinggi yaitu pada bulan April sebanyak 11 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2017 sebanyak 796 orang dan meninggal 3 orang.

Tahun 2020 terdapat 9 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari Keracunan makanan 3 kali, Tetanus Neonatorum 2 kali, Diphteri 2 kali dan Pertusis 2 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Januari sebanyak 4 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2020 sebanyak 9 orang dan meninggal 2 orang.

Tahun 2021 terdapat 6 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan.

Frekuensi KLB ini terdiri dari Tetanus Neonatorum 3 kali, Diphteri 3 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan September sebanyak 2 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2021 sebanyak 6 orang dan meninggal 4 orang.

Tahun 2022 terdapat 39 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari Keracunan makanan 9 kali, Tetanus Neonatorum 4 kali, Diphteri 3 kali, chikungunya 2 kali, Campak 2 kali, dan Pertusis 19 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Desember sebanyak 8 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2022 sebanyak 39 orang dan meninggal 8 orang.

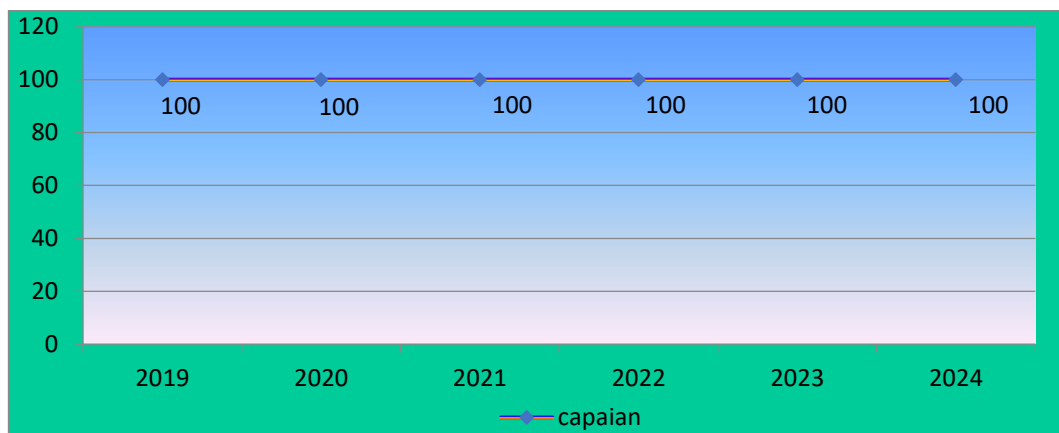
Tahun 2023 terdapat 108 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari Keracunan makanan 12 kali, Tetanus Neonatorum 3 kali, Diphteri 1 kali, chikungunya 3 kali, Campak 3 kali, Pertusis 81 kali, Rabies 4 kali dan DBD 1 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Februari sebanyak 21 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2023 sebanyak 955 orang dan meninggal 12 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang terdampak adalah sebanyak 89.740 orang.

Tahun 2024 terdapat 73 kali KLB di Provinsi Sumatera Selatan. Frekuensi KLB ini terdiri dari Keracunan makanan 4 kali, tetanus neonatorum 2 kali, campak 1 kali, pertusis 62 kali dan rabies 4 kali. Frekuensi KLB yang tertinggi yaitu pada bulan Oktober sebanyak 11 kali. Jumlah penderita yang dilayani pada tahun 2024 sebanyak 156

orang dan meninggal 10 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang terdampak adalah sebanyak 38.051 orang. Tidak ada KLB level provinsi yang terjadi antara tahun 2019 – 2024.

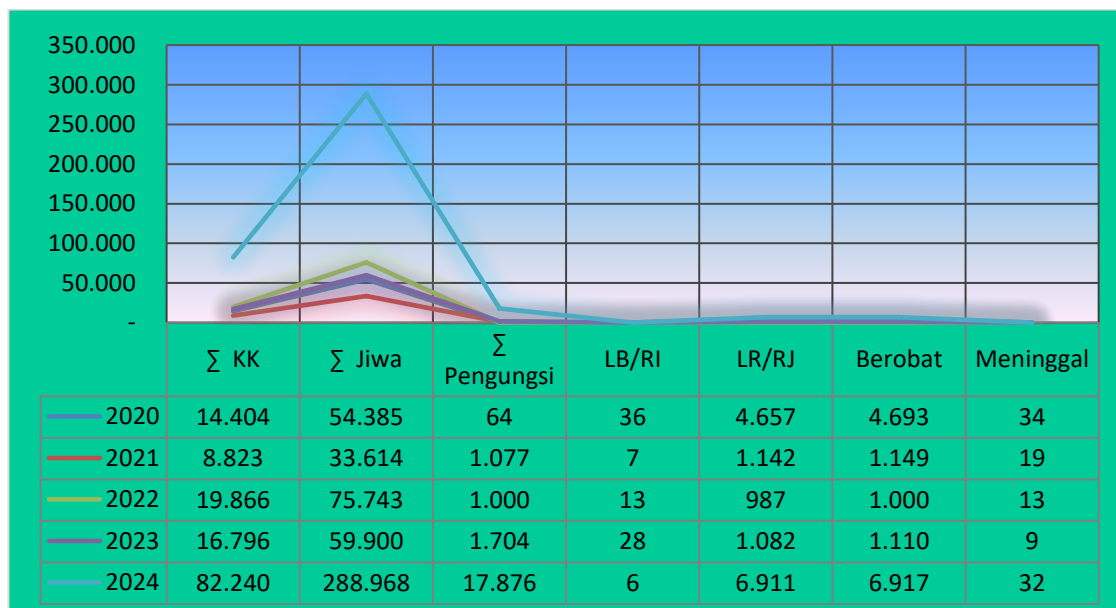
2.1.3.14 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana

Grafik 2.12 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2024



Sumber : Surveilans & Imunisasi Dinkes Tahun 2024

Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana pasti mendapat pelayanan Kesehatan.



Dari grafik 1 diatas terlihat kejadian krisis bencana dan selalu mengalami fluktuatif setiap tahun, hal tersebut tergantung musim. Dari hasil kegiatan penanggulangan dan pelayanan krisis kesehatan didapatkan hasil sebagai berikut:

- Jumlah masyarakat yang dilayani sebanyak 6.917 orang di 12 Kab/kota
- Semua korban/penderita krisis kesehatan bencana terlayani dan mendapatkan pengobatan di pelayanan kesehatan, target kegiatan 100%
- Adanya respon cepat terhadap kejadian krisis kesehatan akibat bencana
- Setiap kejadian krisis kesehatan akibat bencana dapat tertolong dan dilayani di pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan
- Krisis Kesehatan akibat bencana ditanggulangi dalam waktu < 24 jam.
- Menurunnya angka kecacatan, kesakitan maupun kematian akibat krisis kesehatan bencana.
- Tidak ada kejadian bencana level provinsi yang terjadi pada tahun 2019 – 2024.

Kegiatan Pengadaan pada program Krisis Kesehatan tahun 2024 telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik 100%, artinya semua pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Adapun jenis pengadaan sebagai berikut :

- Pengadaan Seragam Bagi EMT
- Pengadaan Bahan Kimia
- Pengadaan Obat-obatan terkait bencana
- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Kit Terkait Bencana

Permasalahan yang terjadi antara lain ;

- a. Pelatihan/peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko krisis kesehatan di daerah rawan bencana hanya di lakukan 10

kali/lokasi/desa pada tahun 2024, ini hanya 0.3% dari jumlah desa di Provinsi Sumatera Selatan (*jumlah 3.270 desa, BPS tahun 2023*)

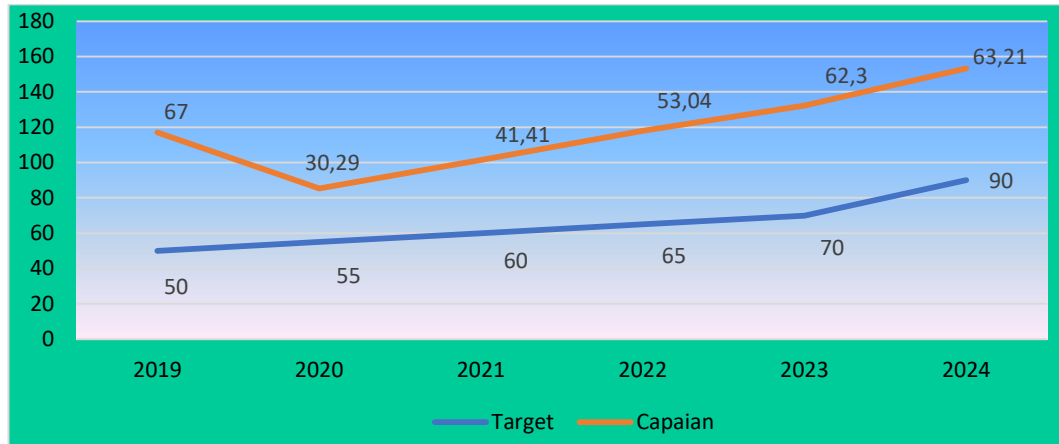
- b. Petugas dan pengelola program krisis kesehatan ditingkat puskesmas dan ditingkat pelayanan di rumah sakit belum mendapatkan peningkatan kapasitas Pengelolaan / Penanggulangan Krisis Kesehatan dan penanganan korban krisis bencana
- c. Baru sebagian kabupaten/kota mempunyai rencana kontijensi dan rencana operasi sehingga menyulitkan upaya penanggulangan dan pencegahan krisis kesehatan
- d. Belum dilakukan kegiatan simulasi penanggulangan krisis kesehatan tingkat provinsi.
- e. Penguatan Anggaran

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- a. Memberikan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat terutama daerah rawan bencana/resiko tinggi, berdasarkan rencana operasi, mitigasi, dan kontijensi, serta memberikan materi upaya pemahaman serta mencegah terjadi bencana dan cara pertolongan dirinya sendiri (P3K) masyarakat yang beresiko tinggi.
- b. Memberikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas mulai dari tingkat puskesmas dan rumah sakit dengan cara pelatihan dan pertemuan baik ditingkat puskesmas hingga dinas kesehatan kabupaten/kota melibatkan semua klaster kesehatan yang berperan dalam penanggulangan bencana
- c. Penyusunan rencana kontijensi dan rencana operasi bagi seluruh Dinas Kesehatan Kab/Kota
- d. Dilaksanakan Kegiatan simulasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana tingkat provinsi
- e. Diusulkan Rencana kebutuhan anggaran Tahun 2025, baik APBN maupun APBD.

2.1.3.15 Treatment Coverage TBC

Grafik 2.13 Treatment Coverage TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 s/d 2024



Sumber : Seksi Penyakit Menular Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluaktif dari tahun 2019 sebesar 67%, turun pada tahun 2020 sebesar 30,29% kemudian naik menjadi 41,41% pada tahun 2021 kemudian naik lagi menjadi 53,04% pada tahun 2022 kemudian naik lagi pada tahun 2023 sebesar 62,3 % dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 63,21% tapi pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan sebesar 90%.

Rendahnya pencapaiannya yang belum mencapai target dikarenakan :

1. Kurangnya komitmen antar lintas sektoral, pelaksana pelayanan, dan pendanaan untuk operasional serta sarana dan parasana.
2. Terjadinya pergantian SDM yang telah di OJT.
3. Server pencatatan pelaporan SITB tersendat (tidak dapat berfungsi dengan baik).



Monev TCM 2024

4. Rendahnya utilitas TCM.
5. Pemahaman yang salah tentang TBRO.
6. Belum seluruhnya Rumah Sakit dan DPS melaksanakan strategi DOTS.

Upaya yang harus dilakukan, antara lain:

- a) Advokasi dengan pimpinan / lintas sektoral/ pemangku kebijakan serta RS terkait komitmen eliminasi TB;
- b) Menyiapkan reward bagi SDM yang telah di OJT / berusaha dipertahankan;
- c) Koordinasi dengan tim IT pusat terkait kendala server;
- d) Meningkatkan penjangkaran kasus dengan skrining dan memeriksa TCM dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah/camat setempat dan PKM;
- e) Memberikan edukasi ke masyarakat tentang penyakit TB bekerja sama dng Kader,PKM, dan lintas sektoral;
- f) Melakukan Kerjasama dengan Rumah sakit dan DPS untuk melaksanakan strategi DOTS.

2.1.3.16 Treatment Succes Rate TBC

Grafik 2.14 Treatment Succes Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan Selama 6 (enam) Tahun 2019 s/d 2024



Sumber : Seksi Penyakit Menular Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 95%, turun pada tahun 2020 sebesar 94% kemudian turun lagi menjadi 90% pada tahun 2021 kemudian naik menjadi 91% pada tahun 2022 tapi turun pada tahun 2023 sebesar 90,95 % dan turun lagi pada tahun 2024 menjadi 88,43% tapi pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan sebesar 90%.

Rendahnya persentase Kasus TBC yang diobati dan disembuhkan antara lain:

1. Akses masyarakat mendapatkan pelayanan TB masih kurang terutama untuk daerah terpencil.
2. Kurangnya penjangkaran di tempat – tempat resiko tinggi seperti di daerah kumuh padat pemukiman penduduk, pondok pesantren, asrama, barak, dan lapas/rutan.
3. Masih terdapat pengobatan TB tidak sesuai standard.
4. Masih banyak pasien menolak pengobatan dan memilih pengobatan alternatif.



Monev P2TBC Tahun 2024

Upaya yang dilakukan dalam Succes Rate TBC yaitu :

- Bekerja sama antara puskesmas induk, puskesmas pembantu, dan perangkat desa (kepala desa, bidan, dll).
- Melakukan skrining di tempat – tempat pemukiman padat penduduk dan resiko tinggi seperti pondok pesantren, asrama,, barak, dan lapas / rutin.
- Memberikan pelatihan / OJT bagi nakes terkait update tatalaksana TB.
- Berkoordinasi dengan PKM, kader, dan Kades/RT/RW/Lurah untuk dilakukan kunjungan ke rumah guna memberikan edukasi kepada

pasien tersebut untuk melanjutkan pengobatan & sosialisasikan terkait bantuan transport dari pemerintah.

2.1.3.17 Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (1) berbunyi: “Besaran anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji”. Pada ayat (2) : “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Untuk besaran proporsi anggaran bidang kesehatan dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan di luar gaji dalam 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.6 Proporsi Anggaran Kesehatan Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	APBD Provinsi diluar Gaji	Anggaran Fungsi Kesehatan	% Anggaran Kesehatan
1	2019	8.677.475.747.642	268.448.531.437	3,09
2	2020	8.475.688.120.168	225.260.056.763,64	2,65
3	2021	9.320.759.866.373	550.186.829.149	5,90
4	2022	8.072.412.304.851	205.023.576.814	2,54
5	2023	8.805.137.017.558	304.379.127.827	3,46
6	2024	8.767.347.113.734	467.820.630.113	5,34

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah anggaran kesehatan dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuatif, namun jika dilihat dari proporsi anggaran kesehatan dibanding dengan total APBD Provinsi diluar gaji masih berfluktuatif. Proporsi anggaran kesehatan terbesar pada tahun 2021 sebesar 5,90% kemudian pada tahun 2024 telah mencapai 5,34%, telah sesuai dengan amanat Undang - Undang Kesehatan bahwa

alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar 10% dari total APBD diluar belanja gaji ASN.

Pencapaian kinerja keuangan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 – 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam juta rupiah)				Rasio setara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	251.960.201.842	81.392.251.764	93.734.513.986	201.488.486.906	233.813.388.810	75.572.906.284	81.563.703.808	191.315.083.762	92,80	92.85	87.02	94,95
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000	50.000.000	461.000.000		38.510.000	33.345.000	393.520.586		77.02	66.69	85,36
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000	50.000.000	461.000.000		38.510.000	33.345.000	393.520.586		77.02	66.69	85,36
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.958.801.000	41.377.383.000	39.406.261.000	164.685.893.570	96.111.880.296	39.551.298.762	36.019.904.838	163.632.598.475	87,91	95.59	91.41	99,36

Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96.698.841.000	40.158.737.000	38.431.261.000	163.800.653.570	85.116.382.736	38.798.787.415	35.126.474.488	162.794.130.285	88,02	96.61	91.40	99,39
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.163.960.000	995.596.000	800.000.000	714.740.000	924.880.000	707.740.000	719.040.000	690.850.000	79,46	71.09	89.88	96,66
Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000		175.000.000	170.500.000	38.896.000		174.390.350	147.618.190	81,03		99.65	86,58
Subkegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	48.000.000	48.000.000			31.721.560	44.771.347			66,09	93.27		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			135.000.000	280.000.0000			95.786.913	102.443.075			70.95	36,59
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			135.000.000	280.000.000			95.786.913	102.443.075			70.95	36,59
Kegiatan Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	1.213.000.000	2.189.225.000	1.781.905.000	1.183.367.500	656.981.371	1.798.785.896	1.596.028.257	970.057.771	54,16	82.17	89.57	81,97

Subkegiatan Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		720.000.000		350.000.000		696.619.250		348.850.000		96,75		99,67
Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	308.000.000	381.603.000	629.000.000		94.346.600	105.680.000	601.901.949		30,63	27,69	95,69	
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	905.000.000	1.087.622.000	1.152.905.000	443.247.500	562.634.771	996.486.646	994.126.308	397.985.664	51,93	91,62	86,23	89,79
Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				390.120.000				223.222.107				57,22
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.102.000.000	3.795.692.700	4.918.767.500	2.564.299.250	3.557.454.996	3.747.259.164	4.561.086.080	2.381.715.227	86,72	98,72	92,73	92,88
Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	350.000.000	245.204.000	397.487.000	169.441.000	296.327.300	234.836.500	391.459.500	168.261.700	84,66	95,77	98,48	99,30
Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			500.000.000	279.000.000			496.700.000	276.821.000			99,34	99,22

Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.172.000.000	665.063.700	1.020.621.500	475.858.250	957.948.750	660.439.049	840.305.164	433.084.400	81,74	99.3	82.33	91,01
Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	601.000.000	378.525.000	419.759.000	196.250.000	568.155.804	378.444.451	405.197.500	194.010.020	94,54	99.98	96.53	98,86
Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	40.000.000	25.800.000	25.800.000	12.500.000	38.401.000	21.505.000	22.347.500	4.122.000	96	83.35	86.62	32,98
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.340.000.000	1.300.000.000	1.865.000.000	1.200.000.000	1.103.461.142	1.299.437.619	1.756.690.616	1.075.633.107	82,35	99.96	94.19	89,64
Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	599.000.000	681.100.000	690.100.000	231.250.000	593.161.000	662.668.545	648.385.800	229.783.000	99,03	97.29	93.96	99,37
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.975.250.000	3.440.113.000	11.015.647.600	3.170.466.950	1.738.124.100	3.340.725.682	9.676.761.394	3.061.641.950	88	97,11	87.85	96,57
Subkegiatan Pengadaan Mebel				694.500.000				623.575.000				89,79

Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.335.000.000				1.255.950.000				94.08	
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.535.000.000	3.351.025.000	4.380.647.600	2.123.658.000	1.461.621.900	3.251.637.682	3.527.493.344	2.085.758.000	95,22	97,03	80.52	98,22
Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.300.000.000	352.308.950			4.893.318.050	352.308.950			92.33	100
Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	440.250.000	89.088.000			276.502.200	89.088.000			62,81	100		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.075.884.250	13.042.423.522	14.127.874.600	10.915.113.576	42.266.412.018	10.739.621.321	11.749.034.444	5.792.402.189	89,78	83.34	83.16	53,07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	32.800.000	31.000.000	12.500.000	14.934.814	25.343.500	11.789.000	3.395.000	99,57	77.27	38.03	27,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.609.113.878	2.961.800.000	3.441.220.000	2.542.600.000	8.274.106.468	1.896.462.835	2.406.803.794	2.765.406.675	96,11	64.03	69.94	108,76
Subkegiatan Penyediaan Jasa Umum Kantor	38.451.770.372	10.047.823.522	10.655.654.600	8.360.013.576	33.977.370.736	8.817.814.986	9.330.441.650	3.023.600.514	88,36	87.76	87.56	36,17

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.998.095.500	15.942.814.542	17.600.039.582	15.013.846.060	7.437.503.290	14.810.812.015,12	13.805.218.121,7	12.431.834.201	92,99	92.90	78.44	82,80
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.816.348.000	2.110.312.000	2.308.912.000	1.698.000.000	1.814.148.949	1.873.315.199	2.288.602.500	1.612.098.161	99,88	88,77	99.12	94,94
Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.985.747.500	13.544.502.542	14.514.648.282	12.862.546.060	4.546.746.861	12.654.859.816,12	10.753.984.221,7	10.371.978.040	91,19	93.43	74.09	80,64
Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.196.000.000	288.000.000	776.479.300	453.300.000	1.076.607.480	282.637.000	762.631.400	447.758.000	90,02	98.14	98.22	98,78
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	91.637.171.092	1.454.600.000	4.699.018.704	3.214.500.000	92.045.032.740	1.446.277.169	4.026.538.760	2.548.870.290	100,45	99.43	85.69	79,29

Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	91.637.171.092	1.454.600.000	4.699.018.704	3.2114.500.000	92.045.032.740	1.446.277.169	4.026.538.760	2.548.870.290	100,45	99.43	85.69	79,29
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	264.352.410.544	117.017.167.050	202.504.645.341	263.897.587.207	203.442.719.077	112.293.499.757	164.232.163.387,57	256.551.972.550	76,96	95.96	81.10	97,22
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	108.586.245.304	19.444.662.200	19.005.090.300	15.466.654.781	90.367.273.162	18.982.217.523	17.517.848.753,57	15.300.177.341	83,22	97.62	92.17	98,92
Sub kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	43.505.471.450				40.667.792.020				93,48			

Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.074.601.000	4.000.000.000	192.721.300		1.055.810.900	3.720.091.700	192.721.300		98,25	93	100	
Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.000.000.000	825.414.900			1.165.610.100	825.414.900			58,28	100		
Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	33.918.129.607				25.746.772.316				75,91			
Subkegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	14.325.452.247	1.500.000.000	1.500.000.000		10.534.811.950	1.492.395.000	1.497.593.570		73,54	99.49	99.84	
Subkegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	750.000.000				456.546.600				60,87			
Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		100.000.000	100.000.000	148.739.500		96.348.000		136.769.600		96.35		91,95

Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	524.591.000	1.069.513.000	1.227.225.000	747.721.500	410.804.500	991.988.400	1.191.499.739	712.962.782	78,31	92.75	99.84	98,35
Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.010.000.000	11.949.734.300	15.985.144.000	14.570.193.781	10.329.124.776	11.855.979.523	14.636.034.144,57	14.450.444.959	86	99.22	99.84	98,18
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	154.393.247.440	95.534.139.350	181.028.870.041	247.467.992.426	111.876.401.551	91.708.471.173	144.479.585.306	240.523.244.110	72,46	96	99.84	97,19
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	38.008.667.800	4.886.386.350	872.593.500	926.250.000	14.590.215.363	3.560.251.854	751.217.375	619.527.499	38,39	72.86	99.84	66,89

Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	274.000.000	843.050.000	653.610.000	570.176.000	142.929.764	326.370.807	413.636.750	68.479.100	52,16	38.71	99.84	12,01
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	556.160.000	1.022.039.000	1.881.054.000	1.269.834.000	502.706.000	962.610.440	1.586.327.440	1.195.730.609	90,39	94.19	99.84	94,16
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	160.000.000	904.218.820	1.129.030.200	40.010.000	159.662.000	815.553.244	1.035.392.437	33.895.000	99,79	90.19	99.84	84,72
SubkegiatanPengelolan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			145.627.000	40.760.000			127.013.310	34.337.000			99.84	84,24
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.807.089.000	6.188.000	3.484.853.896	7.530.148.000	5.651.298.032	5.192.569	3.217.175.258	7.341.567.296	83,02	83.91	99.84	97,50
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	81.930.000	781.646.000	3.346.116.000	1.114.040.000	0	745.665.228	2.497.404.557	940.354.705	0	95.40	99.84	84,41

Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	536.625.000	285.940.000	1.050.269.148	545.255.000	421.176.000	214.516.000	1.029.649.527	468.162.662	78,49	75.02	99.84	85,86
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			265.940.000	206.330.000			248.232.000	188.690.000			99.84	91,45
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	72.800.000	170.113.000	176.333.000	118.545.500	72.755.000	169.895.000	174.798.000	107.787.500	99,94	99.87	99.84	90,93
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.572.436.550	2.706.231.400	3.671.953.000	1.867.142.500	2.072.924.035	2.651.476.101	3.506.371.901	1.669.282.814	80,58	97.98	99.84	89,40
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			102.666.000				102.313.000				99.84	
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	120.608.000	177.460.000	477.707.000	89.482.500	0	61.114.000	247.049.000	85.774.488	0	34.44	99.84	95,86

Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)												
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	5.237.622.000	452.232.000	3.631.222.000	151.861.500	4.643.650.668	324.834.000	3.505.597.850	150.897.265	88,66	71.83	99.84	99,37
Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	69.229.958.000	5.742.555.000	155.417.004.297	227.434.066.426	66.818.347.088	4.888.925.948	122.472.371.335	222.467.365.770	96,52	85.14	99.84	97,82
Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	92.400.000	75.435.637.280	392.500.000	798.286.000	56.170.000	75.262.529.580	351.126.306	718.813.852	60,79	99.77	99.84	90,04
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	180.000.000	111.000.000	276.705.000	70.000.000	159.848.621	78.756.000	260.535.170	65.567.781	88,80	70.95	99.84	93,67
Subkegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	372.998.850	302.115.000	1.229.100.000	140.000.000	360.470.000	116.120.000	837.924.648	120.784.792	96,64	38.44	99.84	86,27
Subkegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas dan Registrasi Puskesmas			670.000.000	374.178.000			422.981.060	373.856.000			99.84	99,91

Subkegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	150.000.000	600.442.000	547.319.000	207.150.000	19.950.000	588.770.293	385.939.000	195.430.000	13,30	98.06	99.84	94,34
Subkegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	22.541.347.200	369.946.000			11.617.445.620	292.023.000			51,54	78.94		
Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	473.600.000	688.300.000	995.400.000	490.954.000	334.458.360	607.867.109	918.038.562	389.965.590	70,62	88.31	92.23	79,43
Subkegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik			518.999.000	3.450.038.000			299.870.820	3.254.166.887			57.78	94,32
Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga			92.868.000	33.485.000			88.620.000	32.807.500			95.43	97,98
Subkegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	6.924.915.040	48.639.500			4.252.395.000	36.000.000			61,41	74.01		

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	180.000.000	186.000.000	279.400.000	60.000.000	109.478.234	183.040.000	228.321.442	18.223.519	60,82	98.41	81.72	30,37
Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	180.000.000	186.000.000	279.400.000	60.000.000	109.478.234	183.040.000	228.321.442	18.223.519	60,82	98.41	81.72	30,37
Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.192.917.800	1.852.365.500	2.191.285.000	902.940.000	1.089.566.130	1.419.771.061	2.006.407.886	710.327.580	91,34	76.55	91.56	78,67
Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	112.500.000	158.665.500	108.104.000	90.560.000	110.479.000	158.288.000	105.194.000	67.875.580	98,20	99.76	97.31	74,95
Subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	600.000.000	1.176.500.000	1.131.670.000	515.950.000	531.220.000	764.425.000	1.002.232.790	404.283.000	88,54	64.97	88.56	78,36
Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	480.417.800	517.200.000	951.511.000	296.430.000	447.867.130	497.058.061	898.981.096	238.169.000	93,22	96.11	94.48	80,35

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	32.230.201.863	3.785.388.000	880.000.000	492.831.500	13.162.939.448	3.464.338.150	722.416.645	430.609.492	40,84	91.52	82.09	87,37
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	31.760.201.863	3.215.388.000	298.000.000	89.428.000	120832.854.833	3.056.652.536	252.367.064	4.273.691.723	40,41	95.06	84.69	4778,92
Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM	31.632.201.863	3.037.388.000	170.000.000	42.040.000	12.707.431.626	2.934.116.270	126.006.607	4.227.436.030	40,17	96.60	74.12	10055,75
Sub kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	128.000.000	178.000.000	128.000.000	47.388.000	125.423.207	122.536.266	126.360.457	46.255.693	97,99	68.84	98.72	97,61
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	470.000.000	570.000.000	582.000.000	403.403.500	330.084.615	407.685.614	470.049.581	343.746.769	70,23	71.52	80.76	85,21

Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	120.000.000	120.000.000		51.113.000	47.991.600	64.387.500		44.293.475	39,99	53.66		86,66
Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	350.000.000	450.000.000	582.000.000	352.290.500	282.093.015	343.298.114	470.049.581	299.453.294	80,60	76.29	80.76	85
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	199.684.100	211.050.000	468.319.500	118.284.500	84.878.800	198.039.120	441.298.873	87.773.772	42,51	93.84	94.23	74,21
Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	199.684.100	211.050.000	468.319.500	118.284.500	84.878.800	198.039.120	441.298.873	87.773.772	42,51	93.84	94.23	74,21
Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	199.684.100	211.050.000	468.319.500	118.284.500	84.878.800	198.039.120	441.298.873	87.773.772	42,51	93.84	94.23	74,21

Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.444.330.800	2.617.720.000	6.791.649.000	1.823.440.000	1.024.377.909	2.509.469.990	6.297.376.471	1.625.460.938	70,92	95.86	92.72	89,14
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.252.190.800	2.224.820.000	5.266.649.000	720.390.000	835.121.909	2.122.369.990	4.990.592.300	539.152.000	66,69	95.40	94.76	74,84
Subkegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.252.190.800	2.224.820.000	468.319.500	720.390.000	835.121.909	2.122.369.990	441.298.873	539.152.000	66,69	95.40	94.23	74,84
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi	75.000.000	392.900.000	1.525.000.000	1.103.050.000	73.690.000	387.100.000	1.306.784.171	1.086.308.938	98,25	98.52	85.69	98,48

Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi												
Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	75.000.000	392.900.000	1.525.000.000	1.103.050.000	73.690.000	387.100.000	1.306.784.171	1.086.308.938	98,25	98.52	85.69	98,48
Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	117.140.000				115.566.000				98,66			
Subkegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	117.140.000				115.566.000				98,66			
Total	550.186.829.149	205.023.576.814	304.379.127.827	467.820.630.113	451.528.304.045	194.038.253.301	253.256.959.184,27	454.197.729.514	82,07	94.64	83.20	97,09

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dalam 4 tahun terakhir terlihat berflutuasi antara terendah pada tahun 2021 sebesar 82,07% dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 97,09%. Secara keseluruhan rasio antara realisasi dan anggaran pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah mendekati target karena Sebagian hutang pihak ketiga sudah mulai dibayarkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan mencerminkan pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari kebijakan, program, dan Kegiatan Kesehatan, sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum : Seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan, termasuk pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi;
2. Kelompok rentan : Bayi, balita, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dalam pelayanan Kesehatan;
3. Kelompok berisiko : Masyarakat yang berisiko tinggi terhadap penyakit tertentu, seperti, seperti penyakit menular atau tidak menular, yang membutuhkan intervensi Kesehatan yang tepat;
4. Pasien dengan penyakit kronis : Pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung yang membutuhkan pengelolaan dan pengobatan jangka Panjang;
5. Ibu dan Anak : Ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang membutuhkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan;
6. Masyarakat di daerah terpencil : Masyarakat di daerah terpencil atau terisolasi yang membutuhkan akses pelayanan Kesehatan yang lebih baik;
7. Kelompok Masyarakat kurang mampu : Masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dalam mengakses pelayanan Kesehatan yang berkualitas

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melakukan kegiatan dan pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan banyak dibantu beberapa mitra perangkat daerah, antara lain;

- BPJS, dalam Penyelenggaraan JKN bagi kepesertaan, Klaim persalinan seperti skrining hipotiroid kongenital, Jamkesmas.
- Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, dalam Upaya pemeriksaan crosscek Malaria dan pemeriksaan specimen lingkungan terkait keracunan pangan missal kualitas air
- Organisasi Profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dan Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia dalam Upaya pengendalian penyakit Malaria
- Rumah Sakit Rujukan Malaria dalam hal ini RSUP. Moeh. Hoesin, dalam pemeriksaan penyakit malaria yang memerlukan konfirmasi laboratorium oleh analis Kesehatan/ dokter spesialis patologi klinik.
- Adinkes dalam penguatan dan pemberantasan kegiatan HIV/ AIDS, Malaria dan TBC.
- Aplikasi Kegawat daruratan Medik bermitra dengan Kepolisian sebagai penggunaan Bersama, Jasaraharja sebagai Penjamin pendanaan korban kecelakaan dan pelayanan Kesehatan korban kecelakaan, Gojek dan PMI sebagai pertolongan pertama dalam kecelakaan dan Dinkes Kab / Kota dalam pelayanan kegawatdaruratan medis ke Masyarakat.
- Air dan Sanitasi dengan nama Pokja PP (Perumahan Kawasan Permukiman) (STBM masuk dalam Pokja PP), mereka bermitra dengan Bappeda, PU. Perkim, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, BPBPK (Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan), Basnaz, TNI dan CSR.
- Gerakan Penanganan Stunting se- Sumatera Selatan bermitra dengan BKKBN

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

BUMD yang sering mensupport pelaksanaan kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Selatan salah satunya Bank

Sumsel Babel dengan memberikan goodie bag/bantuan tabungan kepada bayi atau balita sehat dan tenaga Kesehatan teladan penerima penghargaan.

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	Permasalahan Pelayanan OPD
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Jumlah kematian ibu maternal Jumlah kematian ibu maternal tahun 2024 sebanyak 108 ditargetkan 131 orang. Fluktuasi jumlah kematian ibu masih terjadi dalam 5 tahun terakhir. Baseline Data Hasil Survei Long Form Sensus Penduduk (2020) AKI Nasional sebesar 189/100.000 dan Provinsi Sumsel sebesar 175/100.000	Standar nasional: <70 per 100.000 kelahiran hidup (SDGs 2030). Target provinsi: penurunan AKI per tahun.	Internal: ✓ Kurangnya SDM kesehatan (kompetensi & jumlah) ✓ Sarana & prasarana belum memadai ✓ Pembiayaan & anggaran terbatas ✓ Sistem informasi kematian ibu belum optimal ✓ Mobilitas Petugas kesehatan di lapangan cukup tinggi khususnya yang telah terlatih ✓ Mobilitas pengelola program di Dinkes Kab/Kota cukup tinggi Eksternal: ✓ Koordinasi lintas sektor belum optimal	✓ Masih lambat nya penurunan AKI ✓ Sistem pencatatan kematian ibu belum akurat dan lengkap (OVM dan OVP untuk dilakukan pengkajian dalam MPDN) ✓ Akses pelayanan kesehatan ibu belum merata, khususnya di daerah terpencil (kesulitan capai mencapai K1 dan K5 USG oleh dokter umum) ✓ Penanganan kasus komplikasi kehamilan belum optimal dikarenakan tenaga kesehatan terlatih gadar matneo belum sesuai standar FKTP, PONED belum maksimal

			✓ Tingkat kemiskinan tinggi ✓ Masih terdapat Budaya Masyarakat merugikan Kesehatan ✓ Data kematian ibu tidak dilaporkan seluruhnya ✓ Masih terdapat dukun/paraji ✓ Masih terdapat kesulitan dalam akses dan jarak tempuh ke FKTP dan FKTRL ✓ Persalinan masih dilakukan di luar faskes terstandar	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Jumlah kematian bayi tahun 2024: fluktuatif, namun masih di atas target nasional. Kematian bayi didominasi oleh BBLR dan asfiksia Survei LP Sensus Penduduk (2020) AKB Nasional 16,85/1000 KH sedangkan Provinsi Sumsel sebesar 16,78/1000	Standar nasional: <12 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMN 2024).	Internal: ✓ Ketersediaan fasilitas neonatal terbatas ✓ SDM kesehatan terbatas di daerah terpencil ✓ Pembinaan tenaga kesehatan belum merata ✓ Pelayanan ANC dan deteksi dini belum optimal ✓ Tatalaksana kasus belum optimal khususnya pada ibu hamil sehingga berdampak produk kehamilan (janin) ✓ Belum semua nakes memiliki Keterampilan dan kompetensi kegawatdaruratan neonatal ✓ Masih rendahnya komitmen nakes dalam melaksanakan SOP karena beban kerja ✓ reward terhadap	✓ Masih tingginya AKB ✓ Penanganan bayi risiko tinggi belum optimal ✓ Keterbatasan sarana rujukan neonatal ✓ Edukasi dan perilaku masyarakat belum mendukung kesehatan bayi

			kinerja yang minim atau tidak merata di setiap wilayah Eksternal: ✓ Edukasi masyarakat tentang perawatan bayi baru lahir masih kurang ✓ Pemanfaatan Buku KIA oleh masyarakat masih belum maksimal ✓ Faktor sosial ekonomi ✓ Masih tingginya angka kelahiran prematur dan stunting Isue gender : pengambil keputusan oleh suami ataupun keluarga	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Prevalensi Stunting Provinsi Sumsel berdasarkan SSGI Tahun 2024 sebesar 15,8 % Turun sebesar 4,5% dibandingkan hasil SSGI Tahun 2023	- Kategori Tinggi jika Prevalensi stunting >20 % - Kategori Sedang jika Prevalensi stunting 14% - 20% - Kategori Rendah jika prevalensi stunting < 14%	Internal: - Mutasi pegawai yang tinggi - Kurangnya kompetensi SDM lapangan (Kader, penyuluh, pedamping keluarga) - Kurangnya SDM Kesehatan (Kompetensi & Jumlah) - Penyusunan anggaran yang tidak berbasis data - Masih ditemukan penginputan data yang tidak valid atau tidak lengkap Eksternal: - Koordinasi lintas sektor belum optimal - Rendahnya status sosial ekonomi - Stigma di masyarakat, tinggi badan adalah warisan genetik - Asupan gizi yang tidak memadai selama masa kehamilan - sanitasi yang buruk - akses air bersih	✓ Akses pelayanan kesehatan ibu belum merata, khususnya daerah terpencil ✓ Cakupan dan kualitas layanan kesehatan rendah (ANC belum memenuhi standar) ✓ Pelayanan gizi kurang optimal (cth.keterlambatan pemberian PMT bagi balita kurus)

			- Kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang tidak mendukung pemberian gizi yang tepat - Kesadaran masyarakat rendah terhadap pentingnya 1000HPK dan pola asuh anak	
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Peningkatan Usia Harapan Hidup	Renstra 2024 - 2026	Internal: 1. Masih adanya penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan 2. Sistem Rujukan belum optimal Eksternal : 1. <i>Triple burden of disease</i>, yaitu belum tuntasnya penanganan penyakit-penyakit menular klasik 2. Lingkungan tidak sehat 3. Kesadaran masyarakat tentang kesehatan belum maksimal 4. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah	✓ Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu Ketersediaan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus ✓ Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Masih tingginya penyakit menular, tidak menular dan bencana	Renstra 2024 - 2026	Internal: 1. SDM Program masih belum memadai dan kompeten 2. Pembiayaan Program belum memadai 3. Logistik Program kurang 4. Ketersediaan alat diagnosis dan terapi masing kurang 5. Standar Petunjuk teknis 6. Fasilitas pelayanan kesehatan 7. Sistem Rujukan 8. Belum semua didukung Regulasi	✓ Pergantian petugas program yang tidak diimbangi dengan kesiapan petugas yang baru ✓ Pembiayaan masih belum memenuhi kebutuhan minimal untuk program ✓ Perubahan iklim yang mempengaruhi virulensi agen ✓ Akses layanan yang terhambat karena keterbatasan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu Ketersediaan logistik program yang belum terpenuhi secara terus

			Eksternal: 1. Perubahan Iklim 2. Gaya hidup 3. Perubahan Virulensi agen penyakit 4. Pola resistansi 5. agen penyakit 6. Regulasi 7. Dukungan lintas sector 8. Lingkungan tidak sehat 9. Kemudahan Transportasi Migrasi penduduk 10. Tingkat pengetahuan Masyarakat 11. Komitmen Organisasi profesi masih kurang mendukung	menerus ✓ Kemudahan transportasi migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran penyakit menular ✓ Pola hidup yang tidak sehat
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Pada akhir tahun 2024 pencapaian obat dan vaksin sebesar 90% dari target Renstra 100% (Renstra Dinkes 2024 - 2026)	Proporsi puskesmas yang memiliki : 1. 90% dari 40 Jenis obat esensial dan 2. 7 jenis vaksin IRL sesuai kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh puskesmas	Internal: 1. Kurangnya SDM kesehatan (kompetensi & jumlah) 2. Sarana & prasarana belum memadai 3. Pembiayaan & anggaran terbatas 4. Keaktifan dalam memonitor ketersediaan obat Eksternal: 1. Obat Tidak dikirim oleh penyedia 2. Bahan Baku yang tidak tersedia 3. Jaringan Internet di Kab/Kota	✓ Kurangnya Sosialisasi Aplikasi SELENA dan Ban Data logistik yang terkait dengan ketersediaan obat ✓ Terlalu banyak aplikasi yang diterapkan
Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD	Pada akhir tahun 2024 Capaian UHC (Universal Health Coverage) Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 98,54% dengan total jumlah penduduk 8.973.168 jiwa (Data Dukcapil Smt. I Th. 2024).	Target RPJMN pada tahun 2025: UHC 98,6% dengan tingkat keaktifan 80%	Internal: Advokasi ke pemangku kepentingan untuk penganggaran Eksternal: Komitmen pimpinan daerah Kab/Kota untuk meningkatkan anggaran	✓ Penurunan Cakupan peserta di SUMSEL karena terjadi pertumbuhan penduduk di SM II Tahun 2024 sebesar 91.522 jw dibandingkan dgn penduduk SM I Tahun 2024 ✓ Kabupaten/Kota dengan capaian di atas 98% namun tingkat keaktifan tidak mencapai 80% serta ada Kabupaten yang cakupan masih di bawah 90% dengan tingkat keaktifan di bawah 75%

Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi tugas pokok dan fungsi internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya kematian bayi dalam 5 tahun terakhir, tahun 2024 sebanyak 656 kasus dari target renstra 502 kasus;
2. Kematian ibu tahun 2024 sebesar 107 kasus dari target 131 kasus dengan persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan Kesehatan sebesar 89,71% dari target 95%;
3. Menurunnya ketersediaan obat dan vaksin tahun 2024 sebesar 90% dari target 100%;
4. Menurunnya treatment coverage TBC tahun 2024 sebesar 63,21% dari target 90%;
5. Menurunnya Treatment Succes Rate TBC tahun 2024 sebesar 88,43% dari target 90%;
6. Menurunnya prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 15,8% dari target 14%;
7. Menurunnya cakupan pengobatan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) baru tahun 2024 sebesar 72% dari target 90%;
8. Menurunnya persentase Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan standar KN1 tahun 2024 sebesar 93,43% dari target 100%;
9. Menurunnya persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi usia < 12 bulan tahun 2024 sebesar 98,1% dari target 100%;
10. Menurunnya jumlah kepesertaan PBI JK tahun 2024 sebesar 4.130.292 jiwa dari target 4.260.228 jiwa;
11. Menurunnya jumlah kepesertaan PBPU Daerah tahun 2024 sebesar 247.488 jiwa dari target 305.248 jiwa.

2.2.2 Isu Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.9 Isu Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025 - 2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan (KLHS) Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Strategi Dinas Kesehatan
✓ Jaringan Puskesmas, Poskesdes, RSUD tersebar di seluruh kabupaten/kota ✓ Tenaga kesehatan diupayakan merata ✓ Program audit maternal perinatal dan ANC terpadu sudah berjalan	✓ Masih tingginya AKI dan AKB ✓ Infrastruktur dan SDM belum merata ✓ Sistem informasi kematian belum optimal ✓ Keterbatasan pembiayaan dan logistik kesehatan	✓ Akses air bersih dan sanitasi ✓ Prevalensi stunting dan gizi buruk ✓ Lingkungan sehat (PHBS, ODF) ✓ Kesehatan ibu dan anak di wilayah rawan bencana	Global: ✓ Target SDGs penurunan AKI/AKB Nasional: RPJMN, penurunan AKI/AKB, stunting Regional: ✓ Masih terdapat Ketimpangan layanan kesehatan antar wilayah ✓ Kontrol kebijakan yang berbeda antar daerah (<i>Reward dan Punsishment</i>) ✓ Mobilitas penduduk tinggi	✓ Penguatan Sumberdaya Kesehatan (SDM dan Sarpras) ✓ Penguatan sistem informasi kesehatan ibu dan bayi ✓ Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak ✓ Penguatan jejaring rujukan maternal dan neonatal ✓ Peningkatan edukasi masyarakat ✓ Kolaborasi lintas sektor untuk percepatan penurunan AKI dan AKB
- jaringan Puskesmas, RSUD tersebar di seluruh Kabupaten/kota - Adanya regulasi teknis terkait	- Cakupan layanan kesehatan belum optimal - Tenaga kesehatan dan kader terbatas - Validasi data rendah	- Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses jamban sehat - Penerapan 5 pilar STBM belum	Global : - Penyakit menular global - Bencana alam yang meningkat - Perubahan iklim	- Penguatan Sumberdaya Kesehatan (SDM dan Sarpras) - Penguatan sistem informasi pencatatan dan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan (KLHS) Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Strategi Dinas Kesehatan
pencatatan dan pelaporan yang mendukung pencegahan stunting - Pemanfaatan data SIGIZIKESGA sebagai intervensi penurunan stunting	- Kurang nya sinergi antar program internal (Gizi, KIA, Promkes, Lingkungan) - Alokasi dana untuk program gizi terbatas, baik dari APBD maupun BOK	menyeluruh : 1. Stop buang air besar sembarangan 2. Cuci tangan pakai sabun 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga 4. Pengelolaan sampah rumah tangga 5. Pengelolaan limbah cair rumah - Limbah medis dari Puskesmas atau klinik belum dikelola secara aman	Nasional : - Target RPJMN Penurunan stunting Regional : - Masih terdapat Ketimpangan layanan kesehatan antar wilayah - Kontrol kebijakan yang berbeda antar daerah (Reward dan Puspishment)	pelaporan - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak - Penguatan jejaring rujukan maternal dan neonatal - Peningkatan edukasi masyarakat Kolaborasi lintas program dan lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting
✓ Jaringan Puskesmas, Instalasi Farmasi Kab/Kota ✓ Tenaga kefarmasian/TTK diupayakan merata	✓ Infrastruktur dan SDM belum merata ✓ Keterbatasan pembiayaan dan logistik kesehatan	✓ Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi ketersediaan obat dan vaksin ✓ Keterlambatan pengiriman obat dan vaksin dapat mempengaruhi ketersediaan kekosongan stock obat ✓ Kerusakan atau kadaluarsa obat dan vaksin yang mempengaruhi ketersediaan dan keamanan pasien	Global: Ketersediaan obat yang belum merata, penggunaan obat yang rasional, resistensi antimikroba serta peredaran obat palsu Nasional: Keterjangkauan, ketersediaan obat esensial dan masalah distribusi obat Regional: ✓ Kekosongan stok obat di fasilitas pelayanan kesehatan ✓ Keterbatasan Anggaran ✓ Sistem Pengadaan yang tidak efisien ✓ Kesulitan Bahan Baku Obat	✓ Meningkatkan alokasi anggaran ✓ Memperbaiki sistem pengadaan obat agar lebih efisien ✓ Membuat perencanaan persediaan obat yang lebih baik ✓ Meningkatkan pelatihan dan manajemen obat/logistic ✓ Memanfaatkan teknologi dalam pengadaan dan distribusi obat/logistic
Terdapat 1.116 Fasilitas kesehatan di seluruh Kab/Kota yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	• Komitmen Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pengalokasian anggaran Program JKN belum optimal • Data	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Global : ✓ Pengalokasian anggaran yang belum optimal Nasional: ✓ Pengembangan system Kesehatan yang efektif dan efisien	• Adanya komitmen dari seluruh pimpinan daerah dalam pengalokasian anggaran Program JKN yang berkelanjutan • Peningkatan kualitas dan keterjangkauan sarana prasarana kesehatan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Kesehatan	Permasalahan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan dan Kesehatan (KLHS) Yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dinas Kesehatan	Isu Strategi Dinas Kesehatan
	kependudukan yang masih harus dilakukan validasi oleh Disdukcapil karena banyak ditemukan permasalahan pada saat dilakukan pendaftaran peserta NIK yang tidak online		Regional : ✓ Kesenjangan akses pelayanan Kesehatan ✓ Pengembangan infrastruktur Kesehatan terutama daerah terpencil	
✓ Jaringan Puskesmas dan RSUD yang tersebar di Kab/ Kota ✓ Tenaga Kesehatan yang merata dan menyebar di Kab / Kota	Masih tingginya penyakit menular, tidak menular dan bencana	✓ Kesadaran Masyarakat dalam PHBS ✓ Akses air minum dan sanitasi ✓ Sistem Rujukan yang belum optimal ✓ Fasilitas pelayanan kesehatan	Global : ✓ Perubahan iklim yang mempengaruhi penyebaran penyakit menular dan tidak menular ✓ Globalisasi dapat memfasilitasi penyebaran penyakit menular Nasional : ✓ Kebijakan Kesehatan dalam mempengaruhi pencegahan dan pengendalian penyakit ✓ System Kesehatan yang efektif dan efisien ✓ Pendidikan Kesehatan yang mempengaruhi perilaku Masyarakat Regional : ✓ Kesenjangan akses Kesehatan antar daerah ✓ Penyakit endemic seperti malaria dan DBD dapat mempengaruhi Kesehatan Masyarakat diaerah tertentu	✓ Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan ✓ Meningkatkan kesadaran Masyarakat ✓ Mengembangkan system surveilans yang efektif untuk memantau penyakit

Berdasarkan tabel diatas, maka isu strategis yang ditetapkan adalah :

1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi;
2. Masih lambatnya penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan;

3. Masih tingginya kasus gizi kurang dan Stunting di wilayah Sumatera Selatan;
4. Pengalokasian anggaran Program JKN yang belum optimal;
5. Masih tingginya penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, DBD dan Malaria) dan penyakit tidak menular (Hypertensi, DM, Jantung, Stroke, Kanker);
6. Masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar;
7. Ketersediaan obat dan vaksin pelayanan kesehatan bagi penduduk belum tercukupi;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan. Dalam upaya mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan) Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 2 (dua) indikator yaitu :

1. Angka Kematian Ibu
2. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis

tersebut ada 4 (empat) indikator yaitu:

1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna
 2. Persentase Kab/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar
 3. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi
 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
-
3. Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis tersebut ada 1 (satu) indikator yaitu:
 1. Indeks Keluarga Sehat

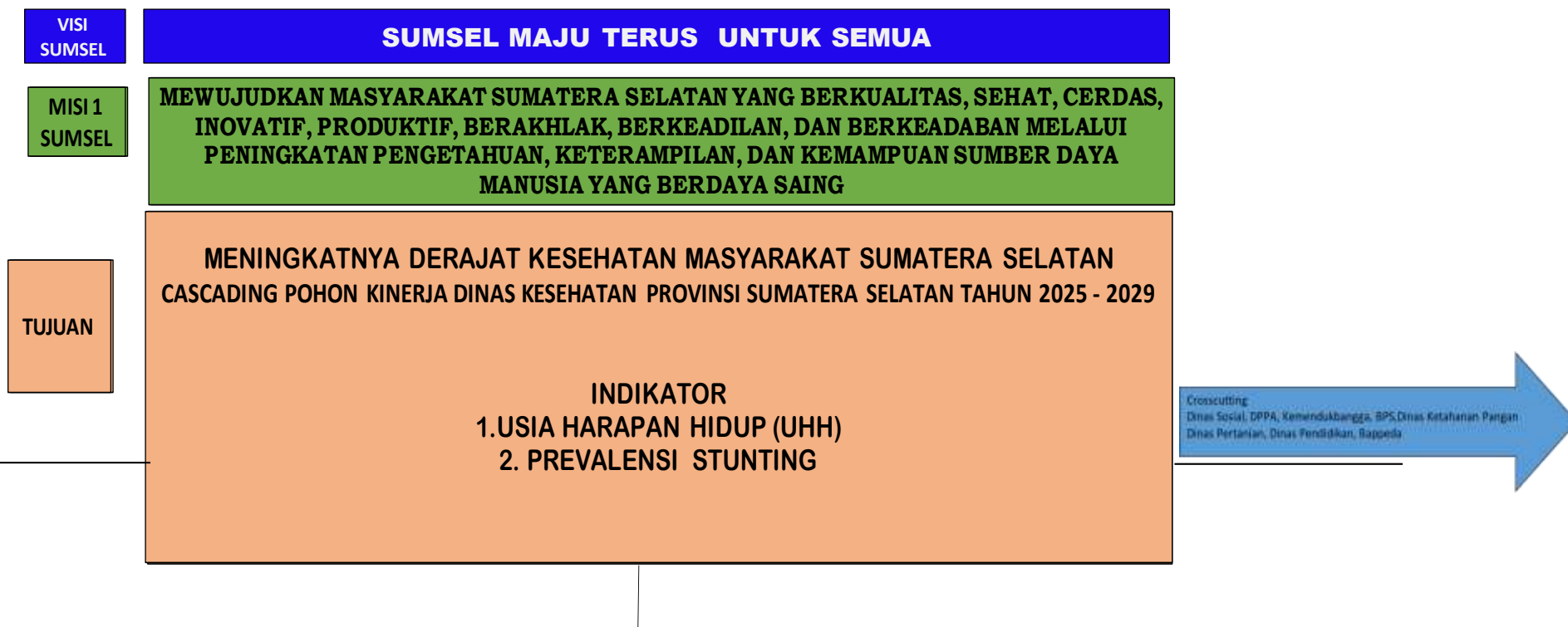
Secara ringkas tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

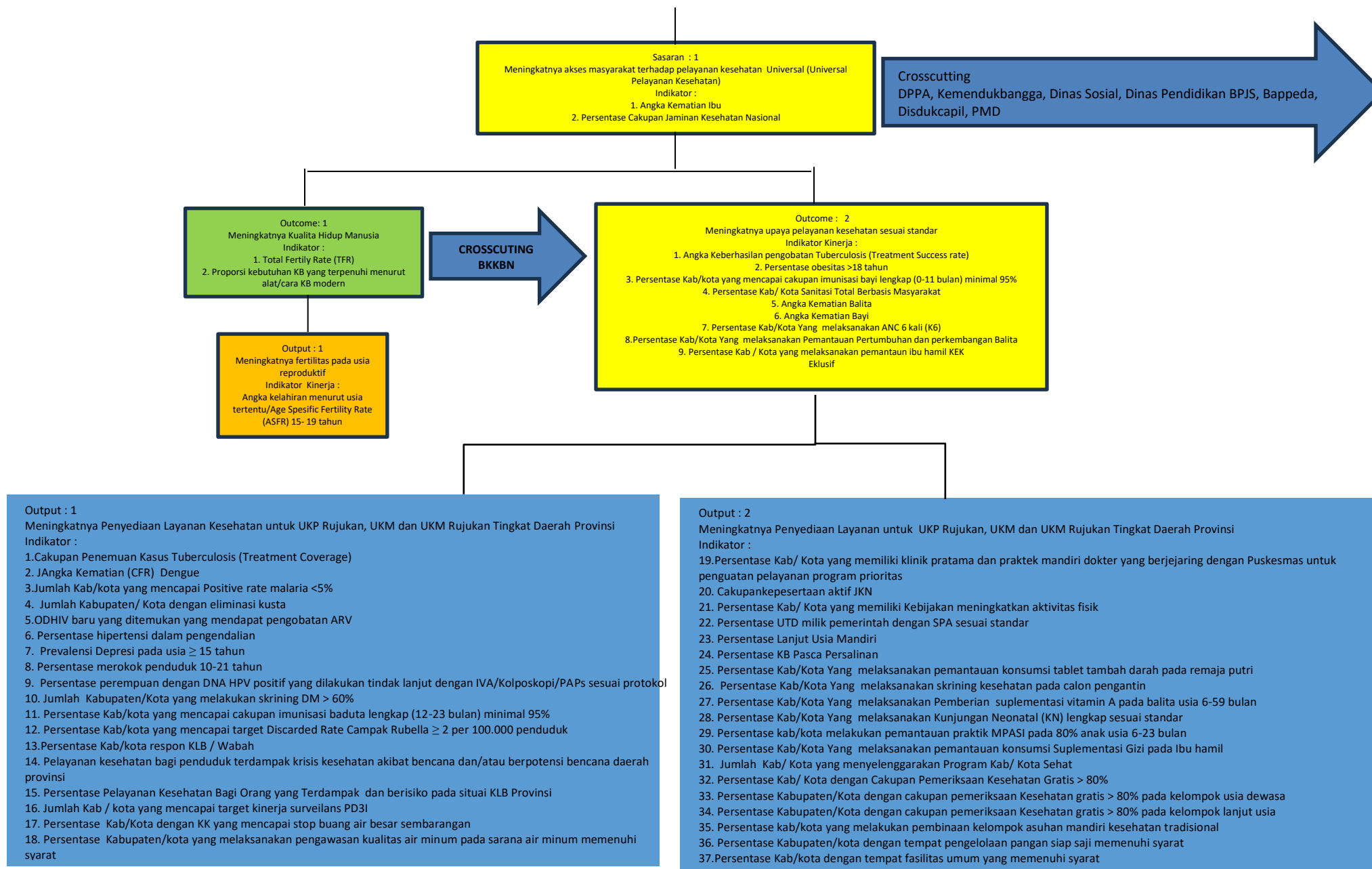
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030

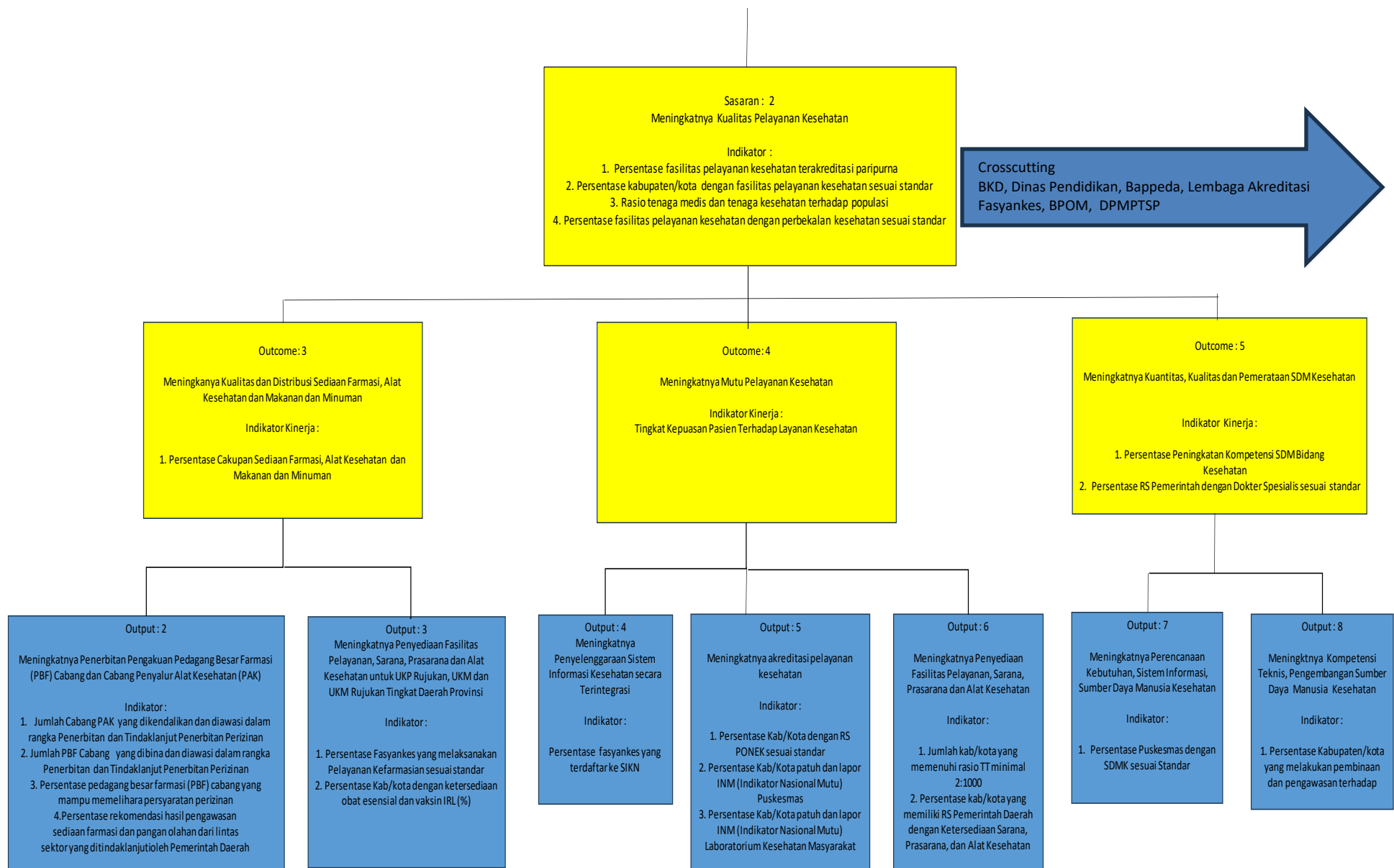
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Usia Harapan Hidup	74.26	74.48	74.71	74.94	75.17	75.4	75.63
			2 Prevelensi Stunting	15.8	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6
	1.1 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)		1 Angka Kematian Ibu (AKI)	67.52	122	109	97	86	77	76
			2 Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	98	98,3	98,5	98,7	98,8	98,9	99
		1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	n/a	30	50	51	75	77,5	80
			2 Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	94,98	83	86	89	92	95	100
			3 Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	n/a	4,9	5	5,3	5,5	5,8	6,1
			4 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	n/a	83	86	89	92	95	100
		1.3 Meningkatkan Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	1 Indeks Keluarga Sehat / IKS	0,342	0.342	0.345	0.347	0.350	0.352	0.355

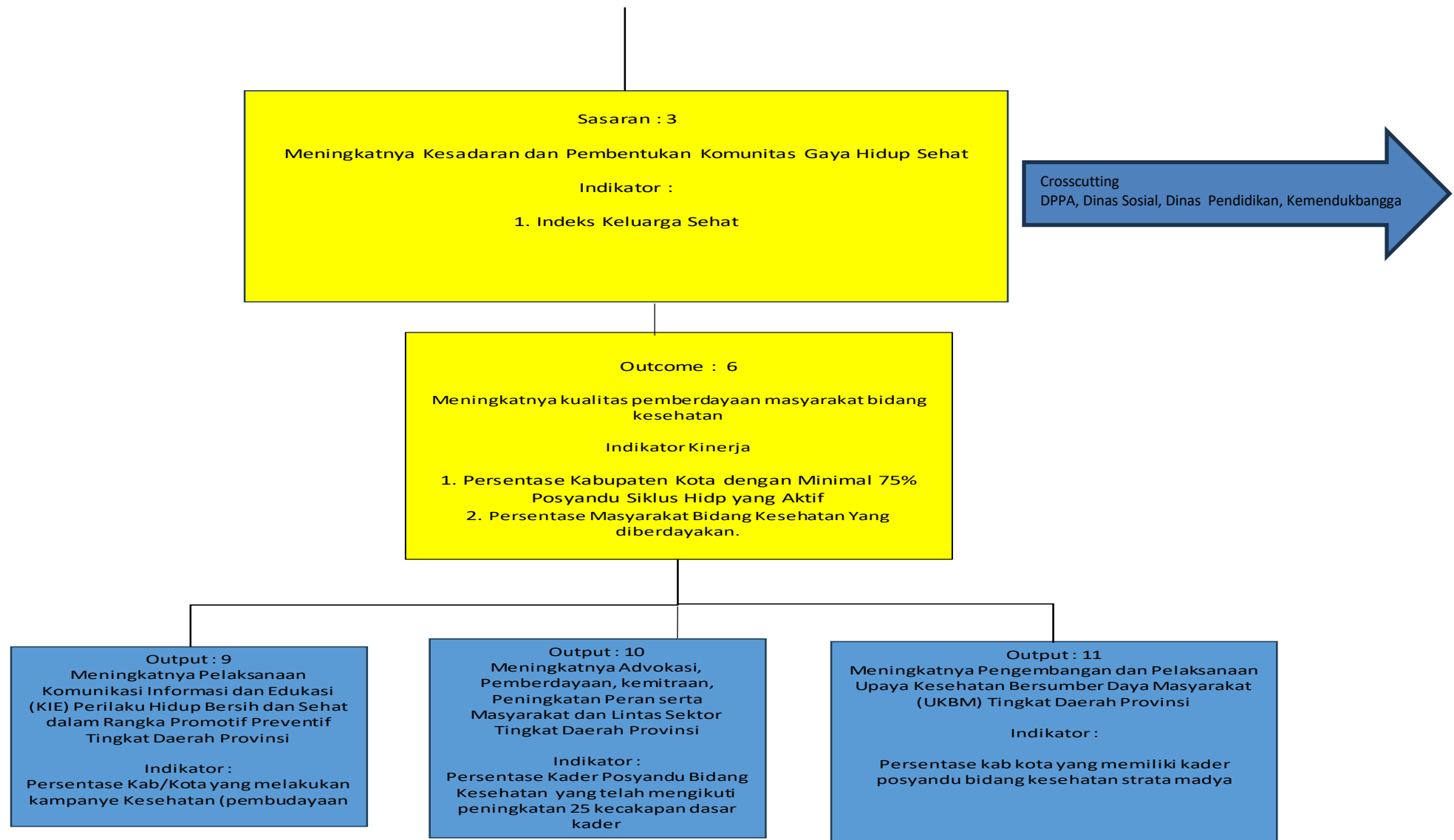
3.3 Cascading Kinerja Dinas Kesehatan

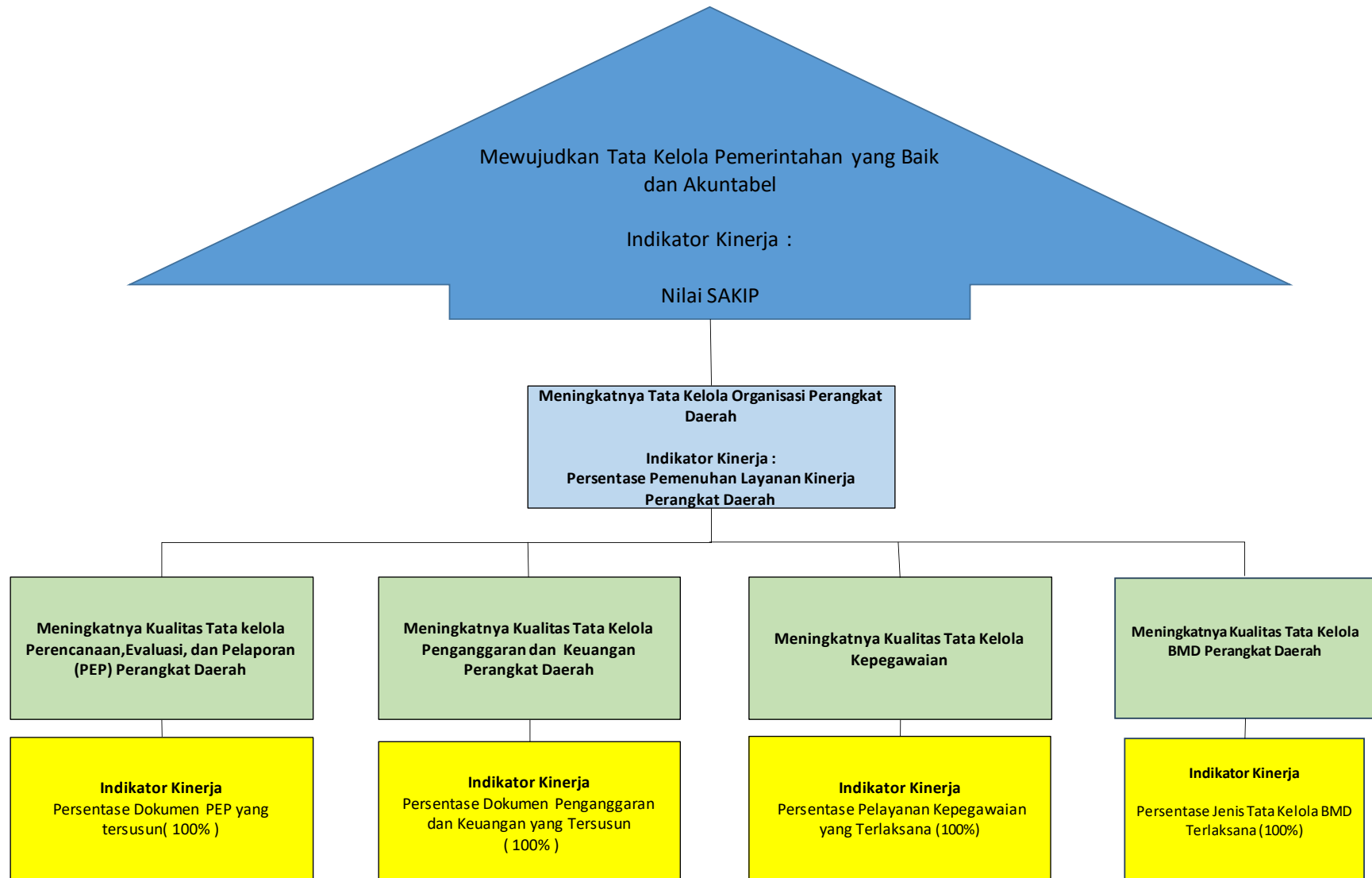
CASCADING POHON KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 – 2029











3.4 Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

Strategi Dinas Kesehatan adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan Upaya yang dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/ kegiatan dan subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan berupa:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	1. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		2. Meningkatkan Kemitraan di Bidang Kesehatan
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Meningkatkan kebutuhan SDM pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
		2. Meningkatkan kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
		3. Menjamin terpenuhinya Kebutuhan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan Obat Program
	3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	1. Melanjutkan Program Berkat Plus (berobat dengan KTP + rumah singgah)
		2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		3. Meningkatkan Pelayanan Gizi Masyarakat
		4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi
		5. Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
		6. Meningkatkan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)	Tahap VI (2030)
Persiapan & Pondasi Pembangunan	Implementasi & Penguatan Dasar	Akselerasi	Optimalisasi	Transformasi & Inovasi	Keberlanjutan
Penguatan keberlanjutan Program Berkat, dengan perbaikan sistem administrasi berobat menggunakan KTP serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas, sekaligus memperkuat keberadaan rumah singgah	Perluasan cakupan Program Berkat Plus hingga mencakup daerah- daerah terpencil melalui peningkatan sosialisasi secara masif serta upaya penambahan rumah singgah di kabupaten/ kota. Program Sambang Rawat mulai	Program Berkat Plus ditingkatkan melalui digitalisasi layanan kesehatan dengan mengupayakan integrasi data KTP dan rekam medis pasien. Program Sambang Rawat diperluas dengan layanan khusus bagi ibu hamil, lansia,	Berjalannya integrasi Program Berkat Plus dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa hambatan administrasi Program Sambang Rawat dilengkapi	Program Berkat Plus dievaluasi secara menyeluruh untuk memperbaiki standar layanan dan menutup celah administrasi Program Sambang Rawat diintegrasikan dengan	Difokuskan pada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan semua program. Program Berkat Plus dimantapkan sebagai layanan alternatif daerah dan disiapkan keberlanjutannya ke periode

melalui identifikasi atau pemetaan di lokasi- lokasi Rumah Sakit Rujukan. Bersamaan dengan itu,	diimplementasikan ke seluruh kabupaten/ kota dengan prioritas daerah miskin dan terpencil.	dan penyandang disabilitas, agar pelayanan lebih inklusif.	dengan mobile clinic berbasis digital yang terhubung dengan pasien miskin.	program kesehatan desa dan posyandu, sehingga layanan lebih terkoordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	berikutnya. Program Sumbang Rawat distandarisasi sebagai upaya yang dapat direplikasi di tingkat nasional.
dilaksanakan uji coba Program Sumbang Rawat di kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,	diarahkan pada penyediaan fasilitas ruang laktasi di layanan publik seperti kantor pemerintahan dan tempat umum, serta revitalisasi posyandu maupun	dengan peningkatan gizi sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin pada level pendidikan dasar. Dari sisi sarana-prasarana,	ditingkatkan dengan digitalisasi data tumbuh kembang anak, yang terintegrasi dengan sistem	fokus diarahkan pada layanan kesehatan remaja termasuk kesehatan mental dan reproduksi. Sarana-prasarana	dan anak, pemprov Sumsel memastikan bahwa program pencegahan stunting, layanan ibu-anak, dan kesehatan remaja menjadi prioritas unggulan pada

serta mengupayakan adanya tenaga kesehatan keliling langsung ke rumah warga miskin. Fokus kesehatan perempuan dan anak dimulai dengan kampanye pencegahan stunting serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara masif di puskesmas melalui ANC minimal 6 kali. Dari sisi sarana-prasarana,	klinik ibu-anak di tiap kabupaten/kota. memastikan puskesmas di daerah dengan akses rendah terhadap layanan kesehatan berjalan dengan baik. Selain itu, dilakukan pelatihan dasar tenaga kesehatan agar standar pelayanan kesehatan dapat merata di seluruh wilayah.	diupayakan peremajaan alat kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan yang termutakhir di rumah sakit rujukan. terkait tenaga kesehatan, dilakukan sertifikasi profesi dan pelatihan spesialisasi agar kualitas layanan semakin meningkat	posyandu dan sekolah. Dari sisi sarana, dilakukan modernisasi rumah sakit rujukan provinsi agar dapat menangani kasus-kasus kompleks di tingkat regional. Sementara itu, untuk mendukung keberlanjutan layanan, dengan memperkuat kerja sama dengan universitas melalui program	kesehatan diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan digital, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi fasilitas kesehatan. Perluasan kualitas Tenaga kesehatan yang lebih baik untuk mendorong pemerataan distribusi di seluruh wilayah	periode selanjutnya. Sarana-prasarana kesehatan dimantapkan agar seluruh layanan sesuai dengan standar nasional yang menuju internasional. Sementara itu, tenaga kesehatan didistribusikan secara merata di seluruh kabupaten/kota, guna memastikan pemerataan layanan kesehatan Berkualitas
--	---	--	--	--	---

dilakukan rehabilitasi puskesmas dan rumah sakit tipe C/D, terutama yang kondisinya tidak layak. Dimulai memetakan kembali distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di desa dan kecamatan dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.			pendidikan tenaga kesehatan		di Sumatera Selatan.
--	--	--	------------------------------------	--	-----------------------------

3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

Arah Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka panjang, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Strategi dan Arah Kebijakan dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
1	Tugas Dinas Kesehatan yaitu Melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi Fungsi Dinas Kesehatan antara lain: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,	1. Meningkatkan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Kuratif, Preventif dan Promotif 2. Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.	1. Advokasi kepada Pemerintah Daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2. Sosialisasi, Informasi dan Evaluasi Hidup Sehat 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan 4. Kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Dunia Usaha untuk mendukung Kesehatan 5. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Kabupaten/ Kota 6. Pendistribusian Tenaga Kesehatan secara merata di setiap Fasyankes 7. Inventarisasi dan Pemetaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap Jenjang Fasilitas Kesehatan 8. Pemenuhan Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di setiap Jenjang Fasilitas Kesehatan sesuai dengan Kewenangan 9. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 10. Penyediaan Obat, Vaksin, Obat Buffer Stock dan Obat Program setiap tahunnya sesuai dengan Kebutuhan Program Pelayanan Kesehatan 11. Penyusunan Perda Integrasi Program JKN-KIS 12. Penyediaan Sharing Anggaran

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan
	pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan; 4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota; 5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi; 6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.		Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Masyarakat tidak mampu yang belum memiliki Kartu JKN-KIS melalui PBI-APBD 13. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 14. Menjamin Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan AKI dan AKB 15. Semua Ibu Hamil harus mendapatkan Pelayanan ANC Terpadu 16. Semua Ibu harus melakukan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan di dan Fasilitas Kesehatan 17. Semua Neonatus, Bayi dan Balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 18. Peningkatan Pelayanan KB sesuai Standar 19. Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Stunting 20. Konvergensi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Lokus Stunting (17 Kab/Kota) 21. Intervensi Pelayanan Gizi Fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan 22. Seluruh Bayi dan Balita harus ditimbang setiap bulan 23. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan 24. Penguatan Kapasitas SDM Kesehatan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 25. Dukungan Anggaran untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 26. Penguatan Kapasitas Petugas Imunisasi 27. Pengangkatan Tenaga Kesehatan Daerah melalui Seleksi sesuai dengan Kompetensi dan Standar Mutu.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

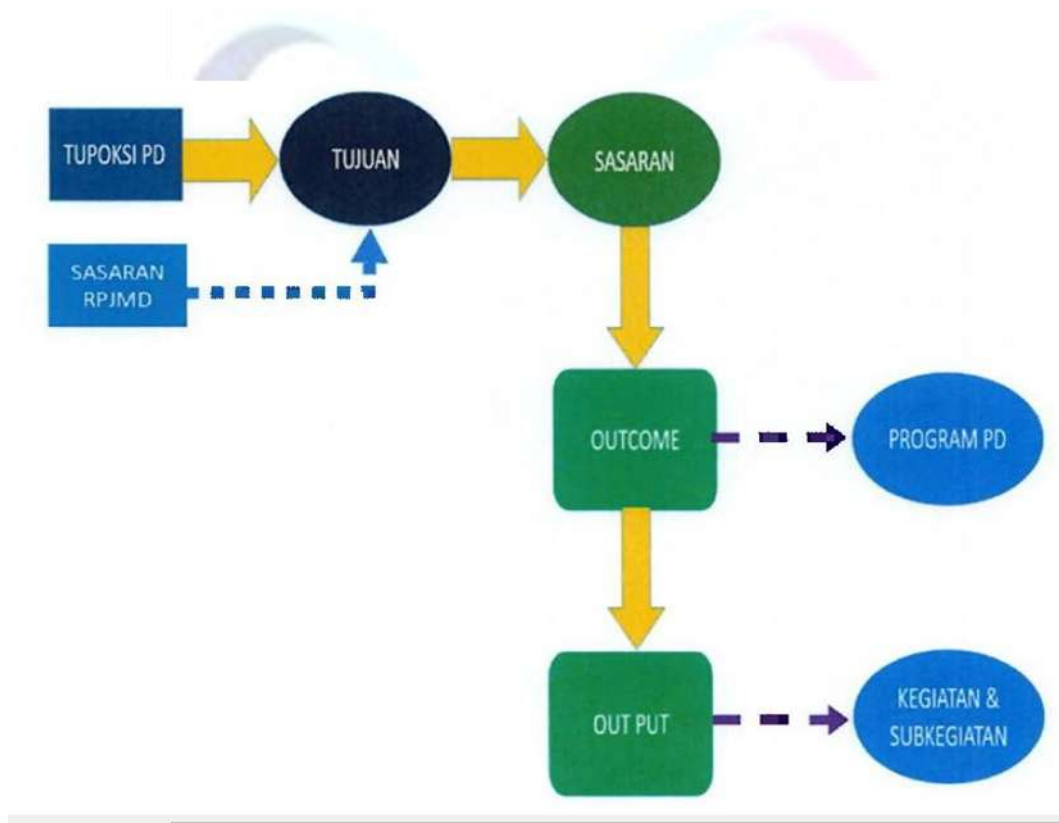
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sub kegiatan indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu lima tahun.

Perubahan kebijakan nasional maupun dinamika perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, khususnya terkait dengan Momenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengampu urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan tingkat Provinsi melaksanakan 1 program penunjang ditambah 4 program teknis yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra PD



Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pada dasarnya mengikuti alur logika perencanaan strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 2025 – 2029. Jadi perumasan tersebut merupakan framework yang menghubungkan arah kebijakan nasional/daerah → tujuan → sasaran → hasil (outcome & output) → indikator → program/kegiatan/subkegiatan.

Tahap perumusan sebagai berikut :

1. Mengacu pada NSPK & RPJMD
 - Awalnya dilihat dulu standar nasional (NSPK: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

- Inilah yang menjadi entry point agar program Dinas Kesehatan selaras dengan arah pembangunan nasional maupun daerah.
2. Menetapkan Tujuan
 - Tujuan sifatnya lebih umum, menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai.
 - Tujuan masih bersifat makro.
 3. Merumuskan Sasaran
 - Sasaran adalah penjabaran tujuan, lebih spesifik dan terukur.
 - Di sini sudah mengarah pada aspek apa yang perlu diperkuat.
 4. Menentukan Outcome (Hasil antara/akhir)
 - Outcome adalah kondisi nyata yang diharapkan terjadi akibat program berjalan.
 - Outcome lebih menekankan pada perubahan yang dialami masyarakat (bukan sekadar kegiatan terlaksana).
 5. Merinci Output (Keluaran langsung)
 - Output adalah produk/jasa langsung yang dihasilkan oleh kegiatan.
 - Output harus nyata dan bisa diukur.
 6. Menetapkan Indikator
 - Indikator adalah ukuran keberhasilan yang bisa dipantau tiap tahun.
 - Indikator ini mengikat, karena nanti dipakai untuk mengukur kinerja OPD dalam RPJMD dan Renstra.
 7. Menentukan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan
 - Ini adalah instrumen nyata pelaksanaan di lapangan.

Disusun mengikuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.

Alur perumusan ini memastikan bahwa setiap kegiatan Dinas Kesehatan:

- Bukan hanya rutinitas, tapi punya kaitan langsung dengan target pembangunan provinsi dan nasional.
- Bisa diukur capaian kinerjanya lewat indikator (diantaranya Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Balita Stunting).
- Memberikan dampak nyata (outcome) bagi Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan.

Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan Sumsel pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				1. Usia Harapan Hidup 2. Prevalensi Balita Stunting		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)			1. Angka Kematian Ibu 2. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional		
		Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan sesuai standar			1. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate) 2. Persentase obesitas >18 tahun 3. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95% 4. Persentase Kab/ Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 5. Angka Kematian Balita 6. Angka Kematian Bayi 7. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6) 8. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita 9. Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) 2. Jangka Kematian (CFR) Dengue 3. Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5 % 4. Jumlah Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta 5. ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV 6. Persentase hipertensi dalam pengendalian 7. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun 8. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun 9. Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol 10. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60% 11. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95% 12. Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk 13. Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah 14. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi 15. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi 16. Jumlah Kab / kota yang mencapai target kinerja surveilans PD3I 17. Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan 18. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN P						101

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					20. Cakupan kepesertaan aktif JKN 21. Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik 22. Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar 23. Persentase Lanjut Usia Mandiri 24. Persentase KB Pasca Persalinan 25. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri 26. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin 27. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan 28. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar 29. Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan 30. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil 31. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Program Kab/Kota Sehat 32. Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis > 80% 33. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa 34. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia 35. Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional 36. Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat 37. Persentase Kab/kota dengan tempat		
	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN P						102

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
				Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
				Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
				Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
				Terlaksananya verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
				Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pelayanan Rumah Sakit	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
				Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Kesehatan			
				Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Sub Kegiatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
				Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan			1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna 2. Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 3. Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi 4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
		Meningkanya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman			1. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		1. Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan 2. Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan 3. Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan 4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	
				Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	
			Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1. Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 2. Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Sub Kegiatan Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
				Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
				Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
				Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
				Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
				Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan		1. Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar 2. Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas 3. Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
				Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan		1. Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000 2. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar		
				Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
		Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan SDM Kesehatan			1. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 2. Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan, Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia Kesehatan		1. Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	
				Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Meningkatnya Kompetensi Teknis, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat			1. Indeks Keluarga Sehat		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1. Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif 2. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatnya Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	
				Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Indikator Kinerja Utama							
NSPK	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.2 Uraian Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
URUSAN PEMERINTAHAN			1.111.028.357.267		1.080.765.830.980		1.203.913.287.316		1.244.659.911.257		1.287.591.065.141		1.393.203.668.350
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		493.358.555.875		493.358.555.875		588.777.538.686		612.437.700.092		625.008.011.448		671.921.413.897
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		493.358.555.875		493.358.555.875		588.777.538.686		612.437.700.092		625.008.011.448		671.921.413.897
Dinas Kesehatan			493.358.555.875		493.358.555.875		588.777.538.686		612.437.700.092		625.008.011.448		671.921.413.897
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	242.903.488.277	100	262.794.657.000	100	313.492.255.021	100	326.090.013.708	100	332.783.025.915	100	357.761.880.165
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	100	764.300.000	100	1.395.100.000	100	1.400.000.000	100	1.510.000.000	100	1.631.000.000	100	1.764.100.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-		-		100.000.000	Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	764.300.000	1 Laporan	1.395.100.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	199.650.000	1 Laporan	219.615.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	242.000.000	1 Laporan	266.200.000	1 Laporan	292.820.000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		-		-		100.000.000	Dokumen	100.000.000		100.000.000		100.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistika Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		-		-		100.000.000	Data	100.000.000		100.000.000		100.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	181.500.000	1 Dokumen	199.650.000	1 Dokumen	219.615.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	550.000.000	1 Berita Acara	605.000.000	1 Berita Acara	665.500.000	1 Berita Acara	732.050.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100	202.662.721.200	100	224.828.857.000	100	263.026.186.671	100	270.468.694.523	100	273.449.430.811	100	280.613.461.651
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.430 org/bulan	201.851.886.000	1.430 org/bulan	224.028.857.000	1.440 org/bulan	262.273.346.671	1.450 org/bln	269.640.570.523	1.460 org/bulan	272.538.494.411	1.470 org/bulan	279.611.431.611
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	722.040.000	4 Dokumen	650.000.000	4 Dokumen	560.340.000	4 Dokumen	616.374.000	4 Dokumen	678.011.400	4 Dokumen	745.812.540
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	88.795.200	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	192.500.000	2 Laporan	211.750.000	2 Laporan	232.925.000	2 Laporan	256.217.500
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100	180.000.000	100	190.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	190.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100	1.130.525.000	100	840.000.000	100	2.345.320.000	100	2.369.752.000	100	2.606.627.200	100	2.657.189.920
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket	1.100.000.000	1 Paket	1.000.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1.026.525.000	212 Orang	750.000.000	233 Org	1.129.172.000	256 Org	1.242.089.200	282 Org	1.366.298.120	310 Org	1.502.927.932
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	1 Orang	104.000.000	100 Orang	90.000.000	100 Org	115.148.000	100 Org	126.662.800	100 Org	139.329.080	100 Org	153.261.988
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100	3.250.458.500	100	3.650.000.000	100	6.086.648.350	100	7.909.057.185	100	6.803.706.904	100	7.344.077.594

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	1 Paket	250.000.000	4 Paket	308.144.000	5 Paket	367.702.400	5 Paket	433.216.640	5 Paket	476.538.304
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	3 Paket	450.000.000	5 Paket	2.500.000.000	5 Paket	4.350.000.000	5 Paket	3.000.000.000	5 Paket	3.300.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	520.458.500	1 Paket	600.000.000	1 Paket	572.504.350	1 Paket	629.754.785	1 Paket	692.730.264	1 Paket	762.003.290
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	450.000.000	2 Paket	400.000.000	6 Paket	605.000.000	8 Paket	665.500.000	8 Paket	732.050.000	8 Paket	805.255.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	11.000.000	12 Dokumen	12.100.000	12 Dokumen	13.310.000	12 Dokumen	14.641.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.400.000.000	250 Laporan	1.410.000.000	250 Laporan	1.650.000.000	250 Laporan	1.400.000.000	250 Laporan	1.400.000.000	250 Laporan	1.400.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	535.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	484.000.000	1 Dokumen	532.400.000	1 Dokumen	585.640.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100	2.665.900.000	100	3.400.000.000	100	7.623.100.000	100	9.135.410.000	100	12.358.951.000	100	27.646.410.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	519.000.000	3 Paket	900.000.000	5 Paket	1.013.100.000	5 Paket	1.114.410.000	5 Paket	1.225.851.000	5 Paket	5.000.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan + Belanja Modal Peralatan (Mesin Gardu Listrik)	1 Unit	2.146.900.000	150 Unit	2.500.000.000	156 Unit	4.000.000.000	161 Unit	4.900.000.000	165 Unit	5.000.000.000	170 Unit	5.500.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000	1 Unit	146.410.000
Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	500.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	4.000.000.000	1 Unit	15.000.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100	11.731.435.957	100	12.140.700.000	100	11.511.000.000	100	12.262.100.000	100	13.013.310.000	100	14.014.641.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	20.000.000	70 Laporan	10.000.000	90 Laporan	11.000.000	110 Laporan	12.100.000	130 Laporan	13.310.000	150 Laporan	14.641.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.435.000.000	12 Laporan	3.500.000.000	13 Laporan	5.000.000.000	14 Laporan	5.500.000.000	15 Laporan	6.000.000.000	16 Laporan	6.500.000.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.276.435.957	12 Laporan	8.630.700.000	13 Laporan	6.500.000.000	14 Laporan	6.750.000.000	15 Laporan	7.000.000.000	16 Laporan	7.500.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100	17.018.147.620	100	12.850.000.000	100	17.250.000.000	100	17.660.000.000	100	17.670.000.000	100	17.947.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1.900.000.000	80 Unit	1.800.000.000	83 Unit	2.000.000.000	86 Unit	2.000.000.000	89 Unit	2.000.000.000	92 Unit	2.200.000.000
Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	14.568.147.620	3 Unit	10.600.000.000	5 Unit	14.500.000.000	5 Unit	14.900.000.000	5 Unit	14.900.000.000	5 Unit	14.900.000.000
Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau anungan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	550.000.000	420 Unit	450.000.000	450 Unit	750.000.000	480 Unit	760.000.000	510 Unit	770.000.000	540 Unit	847.000.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	4.000.000.000	100	4.500.000.000	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.500.000.000	1 Unit Kerja	3.500.000.000	1 Unit Kerja	4.000.000.000	1 Unit Kerja	4.500.000.000	1 Unit Kerja	5.000.000.000	1 Unit Kerja	5.500.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar 2. Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	1. 70 2. 122 3. 14,8	247.565.948.598	1. 75 2. 109 3. 13,8	227.136.128.875	1. 80 2. 97 3. 12,9	271.580.719.060	1. 85 2. 86 3. 12,1	282.494.252.993	1. 90 2. 77 3. 11,3	288.292.460.249	1. 95 2. 76 3. 10,6	309.931.831.206
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 2. Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	1. 91 2. 65	15.956.818.200	1. 92 2. 70	31.100.000.000	1. 93 2. 76	15.654.422.760	1. 94 2. 83	24.100.000.000	1. 95 2. 90	31.300.000.000	1. 96 2. 95	46.333.034.481
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan		-		-		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan							1.000.000.000		2.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000	100 Unit	200.000.000
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit							1.000.000.000		2.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000
Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	900.000.000	17 Dokumen	900.000.000	17 Dokumen	1.400.000.000	17 Dokumen	1.600.000.000	17 Dokumen	1.800.000.000	17 Dokumen	2.000.000.000
Pengembangan Rumah Sakit					-		4.754.422.760		10.000.000.000		10.000.000.000		11.723.034.481

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	14.856.818.200	8 Paket	30.000.000.000	8 Paket	6.100.000.000	8 Paket	7.100.000.000	8 Paket	8.100.000.000	8 Paket	21.210.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	1. 45	230.105.458.398	1.52	194.182.448.875	1.60	253.712.696.300	1.70	256.092.789.778	1.75	254.544.256.272	1.80	
	2. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	2.47.06		2.52.94		2.58.82		2. 64.71		2.70.59		2.76.47	
	3. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	3.80		3.82		3.85		3.88		3.90		3.85	
	4. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	4.75		4.80		4.85		4.90		4.90		4.90	
	5. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	5.91		5.92		5.93		5.94		5.95		5.96	
	6. Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	6.47.06		6.52.94		6.58.82		6.64.71		6.70.59		6.76.47	

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	7. Persentase Kab/ Kota yang memiliki Puskesmas Santun Lansia sesuai standar	7.70		7.75		7.80		7.85		7.90		7.95	
	8. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	8.100		8.100		8.100		8.100		8.100		8.100	
	9. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100	
	10. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	10.50		10.55		10.60		10.65		10.70		10.75	
	11. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pelaporan bayi lahir prematurn (<37 minggu)	11.20		11.30		11.40		11.50		11.60		11.70	
	12. Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	12.10		12.15		12.20		12.25		12.30		12.35	
	13. Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	13.60		13.65		13.70		13.75		13.80		13.85	

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	14. Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	14.90		14.93		14.95		14.97		14.100		14.100	
	15. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	15.80		15.84		15.88		15.92		15.96		15.100	
	16. Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	16.68		6.74		16.78		16.84		16.88		16.94	
	17. Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	17.80		17.85		17.90		17.95		17.100		17.100	
	18. Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	18.10		18.12		18.13		18.14		18.16		18.17	
	19. Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	19.5.8		19.11.7		19.17.6		19.23.5		19.35.3		19.41.2	
	20. Prevalensi Obesitas > 18 tahun	20. 23.4		20. 23.4		20. 23.4		20. 23.4		20. 23.4		20. 23.4	
	21. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	21. 77		21. 78		21. 79		21. 79.5		21. 80		21. 81	
	22. Persentase Kab/Kota dgn CFR direct obstetric (eklamsi dan pendarahan	22. 45		22. 52		22. 60		22. 75		22. 80		22. 85	

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	postpartum) <1%												
	23. Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan Persalinan di Fasyankes	23. 88		23. 89		23. 91		23. 93		23. 95		23. 97	
	24. Angka Kematian Bayi	24. 12.62		24. 11.63		24. 10.97		24. 10.46		24. 9.96		24. 9.5	
	25. Angka kematian neonatal	25. 9.2		25. 8.4		25. 8.0		25. 7.6		25. 7.2		25. 6.7	
	26. Angka Kematian Balita	26. 15		26. 13,8		26. 13,1		26. 12,5		26. 11,9		26. 11,3	
	27. Persentase Kab/Kota dengan eliminasi malaria	27. 100		27. 100		27. 100		27. 100		27. 100		27. 100	
	28. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	28. 95		28. 95		28. 95		28. 95		28. 95		28. 100	
	29. Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	29. 6.3		29. 5.8		29. 5.3		29. 4.8		29. 4,3		29. 3,8	
	30. Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pemantauan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan mendapat ASI Eksklusif	30. 60		30. 65		30. 70		30. 75		30. 80		30. 85	
	31. Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantaun ibu hamil KEK	31. 40		31. 50		31. 60		31. 70		31. 80		31. 90	
	32. Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	32. 94		32. 94		32. 94		32. 100		32. 100		32. 100	
		33. 100		33. 100		33. 100		33. 100		33. 100		33. 100	

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	33. Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	34. 50		34. 60		34. 70		34. 80		34. 90		34. 100	
	34. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan	35. 86		35. 87		35. 88		35.89		35. 90		35. 90	
	35. Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate												
	Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	36. 95		36. 95		36. 95		36. 95		36. 95		36. 100	
	36. Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan)												
	minimal 95%	37.40		37.40		37.40		37.40		37.45		37.45	
	37. Persentase Kab/Kota dengan cakupan penemuan kasus pneumonia balita minimal 40%	38. 25		38. 50		38. 50		38. 75		38. 75		38. 75	
	38. Persentase Kab/Kota yang capaian pengobatan ARV pada Odhiv baru minimal 90%	39. 1		39. 1		39. 1		39. 1		39. 1		39. 1	
	39. Jumlah Kab/Kota eliminasi filariasis	40.40		40.50		40.60		40.70		40.80		40.90	
	40. Persentase Kab/kota yang melaksanakan penemuan kasus dengue dan PSN 3M+	41. 1		41. 5		41. 8		41. 11		41. 14		41. 17	
	41. Jumlah Kab/kota yang telah melakukan pencegahan hepatitis virus	42.5		42.10		42.15		42.20		42.25		42.30	
	42.Persentase												

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kab/kota yang penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43. 2		43. 4		43. 6		43. 8		43. 10		43. 12	
	43. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	44. 2		44. 4		44. 6		44. 8		44. 10		44. 12	
	44. Jumlah Kab/ Kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	45. 4		45. 6		45. 8		45. 10		45. 12		45. 14	
	45. Jumlah Kab/kota yang Puskesmasnya melakukan Pelayanan Terpadu (Pandu PTM) pada minimal 80% kunjungan puskesmas	46. 5		46. 7		46. 9		46. 12		46. 14		46. 17	
	46. Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	47. 50		47. 70		47. 75		47. 82		47. 85		47. 85	
	47. Persentase kabupaten /kota yang proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas >85%	48. 12		48. 12		48. 13		48. 14		48. 15		48. 16	
	48. Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Rabies	49. 45		49. 50		49. 55		49. 60		49. 65		49. 70	
	49. Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	50. 50		50. 60		50. 70		50. 80		50. 90		50. 95	
	50. Persentase kab/ Kota dengan jumlah Puskesmas sesuai standar	51. 6		51. 12		51. 18		51. 24		51. 30		51. 36	
	51. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan												

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Kesehatan gratis > 80%	52. 60		52. 65		52. 70		52. 80		52. 90		52. 100	
	52. Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional												
	53. Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	53. 50		53. 60		53. 60		53. 75		53. 85		53. 90	
	54. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	54. 6		54. 12		54. 18		54. 24		54. 30		54. 36	
	55. Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	55. 6		55. 12		55. 18		55. 24		55. 30		55. 36	
	56. Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	56. 45		56. 50		56. 55		56. 60		56. 65		56. 70	
	57. Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	57. 42		57. 44		57. 48		57. 50		57. 52		57. 52	

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1 Orang	761.718.000	263.863 Orang	850.000.000	279.694 Orang	800.000.000	296.476 Orang	800.000.000	314.265 Orang	800.000.000	333.120 Orang	800.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	906.706.000	31.451 orang	850.000.000	33.338 orang	500.000.000	35.339 orang	500.000.000	37.459 orang	500.000.000	39.706 orang	500.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1.225.462.000	13 Dokumen	950.000.000	14 Dokumen	1.725.000.000	15 Dokumen	1.585.750.000	17 Dokumen	1.800.000.000	20 Dokumen	1.906.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	194.334.000	6 Dokumen	300.000.000	7 Dokumen	431.250.000	8 Dokumen	495.937.500	9 Dokumen	595.125.000	10 Dokumen	714.150.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	101.830.000	4 Dokumen	125.000.000	5 Dokumen	287.500.000	6 Dokumen	330.625.000	7 Dokumen	396.750.000	8 Dokumen	476.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	555.206.000	8 Dokumen	750.000.000	10 Dokumen	1.322.500.000	12 Dokumen	1.587.000.000	14 Dokumen	1.500.000.000	16 Dokumen	1.535.280.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga/Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.238.425.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	440.411.500	2 Dokumen	351.332.650	2 Dokumen	212.247.915	2 Dokumen	233.472.706
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan/Terlaksana nya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	512.647.500	8 Dokumen	1.650.000.000	8 Dokumen	2.706.052.100	8 Dokumen	3.219.344.620	8 Dokumen	2.800.000.000	8 Dokumen	3.081.758.820
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	JumlahDokumenHasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	176.520.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	194.172.000	1 Dokumen	202.998.000	1 Dokumen	211.824.000	1 Dokumen	220.650.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	75.345.000	2 Dokumen	125.000.000	2 Dokumen	155.000.000	2 Dokumen	171.000.000	2 Dokumen	188.000.000	2 Dokumen	207.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (PTM)	1 Dokumen	1.329.388.800	15 dokumen	1.900.000.000	15 dokumen	7.445.451.200	15 dokumen	7.724.996.320	15 dokumen	6.391.386.494	15 dokumen	9.528.745.547
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	100.000.000	3 dok	214.175.000	4 dok	200.000.000	4 dok	220.000.000	4 dok	240.000.000	4 dok	260.000.000

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	177.950.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	215.319.500	1 dokumen	236.851.450	1 dokumen	260.536.595	1 dokumen	286.590.255
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	217.537.817.598	5 dok	179.999.254.000	6 dok	230.000.000.000	6 dok	230.975.534.238	6 dok	231.953.546.268	6 dok	233.000.000.000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	835.140.000	7 Dokumen	450.000.000	7 Dokumen	690.000.000	7 Dokumen	759.000.000	7 Dokumen	834.900.000	7 Dokumen	918.390.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	415.000.000	1 Dokumen	325.554.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	952.173.875	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	300.000.000
Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Primer)	1 Dokumen	125.765.000	2 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	194.240.000	2 Dokumen	213.640.000	2 Dokumen	234.940.000	2 Dokumen	258.940.000
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	289.962.500	4 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	899.800.000	4 Dokumen	989.780.000	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	1.197.633.800

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	360.255.000	12 Dok	750.000.000	12 Dok	510.000.000	12 Dok	530.000.000	12 Dok	550.000.000	12 Dok	560.000.000
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	2.665.876.000	6 Dokumen	2.321.292.000	6 Dokumen	3.821.000.000	6 Dokumen	3.924.000.000	6 Dokumen	3.250.000.000	6 Dokumen	4.029.000.000
Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	70.110.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	475.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	450.000.000	1 Keluarga	100.000.000	1 Keluarga	200.000.000	1 Keluarga	250.000.000	1 Keluarga	250.000.000	1 Keluarga	250.000.000
Penyelenggaraan Sistem informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	60	447.194.000	65	528.680.000	70	400.000.000	80	400.000.000	90	400.000.000	100	400.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	447.194.000	1 Dokumen	528.680.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1. Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	1. 70	1.056.478.000	1. 75	1.325.000.000	1. 80	1.813.600.000	1. 85	1.901.463.215	1. 90	2.048.203.977	1. 95	2.084.485.597
	2. Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000	2. 3		2. 4		2. 5		2. 6		2. 6		2. 6	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas yang dikendalikan atau diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	1 Unit	22.230.000	18 Unit	75.000.000	32 unit	150.000.000	28 Unit	132.000.000	31 Unit	145.000.000	15 Unit	70.000.000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	525.280.000	65 unit	500.000.000	70 unit	845.000.000	75 unit	900.000.000	85 unit	970.000.000	94 unit	1.030.000.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	1 Unit	508.968.000	75 Unit	750.000.000	80 Unit	818.600.000	85 Unit	869.463.215	89 Unit	933.203.977	89 Unit	984.485.597
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	492.831.500	772.885.000	1. 5	577.770.000	1. 5,3	560.794.744	1. 5,5	583.330.411	1. 5,8	595.303.294	1. 6,1	639.987.046

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi 2.Persentase kabupaten kota yang memiliki jumlah Dokter Spesialis sesuai standar pada RS Pemerintah	89.428.000	88.100.000	1. 5 2. 15	102.770.000	1. 5,3 2. 19	88.315.000	1. 5,5 2. 23	95.134.000	1. 5,8 2. 28	102.534.000	1. 6,1 2. 34	126.597.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	42.040.000	53.906.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	40.252.000	1 Dokumen	42.265.000	1 Dokumen	44.378.000	1 Dokumen	46.597.000
Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	47.388.000	34.194.000	100 Orng	47.770.000	225 Orng	48.063.000	250 Orang	52.869.000	275 Orng	58.156.000	300 Orang	80.000.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	403.403.500	684.785.000	47	475.000.000	58	472.479.744	70	488.196.411	82	492.769.294	100	513.390.046
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	51.113.000	209.257.000	120 Orang	75.000.000	140 Orang	49.875.000	160 Orang	52.368.000	180 Orang	54.987.000	200 Orang	54.987.000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	352.290.500	475.528.000	9 Dokumen	400.000.000	11 Dokumen	422.604.744	13 Dokumen	435.828.411	15 Dokumen	437.782.294	18 Dokumen	458.403.046

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar 2. Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	118.284.500	141.246.000	1. 92 2. 70	1.000.000.000	1. 93 2. 76	1.064.686.969	1. 94 2. 83	1.107.471.661	1. 95 2. 90	1.130.202.566	1. 96 2. 95	1.215.036.115
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1. Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 2. Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	118.284.500	141.246.000	1. 27 2. 18	1.000.000.000	1. 27 2. 22	1.064.686.969	1. 27 2. 26	1.107.471.661	1. 27 2. 30	1.130.202.566	1. 27 2. 35	1.215.036.115
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	118.284.500	141.246.000	90 Sarana	1.000.000.000	95 Sarana	1.064.686.969	100 Sarana	1.107.471.661	105 Sarana	1.130.202.566	100 Sarana	1.215.036.115
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1. Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif 2. Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan	720.390.000	1.974.988.000	1. 50 2.	1.850.000.000	1. 60 2.	2.079.082.892	1. 70 2.	2.162.631.319	1. 80 2.	2.207.019.424	1. 90 2.	2.372.679.365

Bidang Urusan Program / Outcome / Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif	720.390.000	477.988.000	50	850.000.000	60	1.011.082.892	70	1.008.131.319	80	921.631.319	90	1.021.631.319
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	720.390.000	477.988.000	1 Dokumen	850.000.000	1 Dokumen	1.011.082.892	1 Dokumen	1.008.131.319	1 Dokumen	921.631.319	1 Dokumen	1.021.631.319
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	1.103.050.000	1.497.000.000	20	1.000.000.000	30	1.043.000.000	40	1.129.500.000	50	1.216.000.000	50	1.318.500.000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1.103.050.000	1.497.000.000	11 Dokumen	1.000.000.000	11 Dokumen	1.043.000.000	11 Dokumen	1.129.500.000	11 Dokumen	1.216.000.000	11 Dokumen	1.318.500.000

Bidang Urusan Program / Outcome /Kegiatan / Sub kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidp yang Aktif	-	-	50	-	60	25.000.000	70	25.000.000	80	69.388.105	90	32.548.046
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	69.388.105	1 Dokumen	32.548.046

4.3 Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

12 Program strategis HDCU :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)
4. Pendidikan yang berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderfull 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Program Strategis Nasional (ProSN) :

No	ProSN	Proyek / Kegiatan
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 3. Sekolah Rakyat 4. Pembangunan 3 Juta Rumah
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk mendukung Swasembada Pangan) 2. Pendayagunaan Penyuluh Kesehatan 3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Cadangan Beras Pemerintah 4. Mencetak dan Meningkatkan produktivitas lahan pertanian (sawah/ lumbung Pangan / Food Estate)
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting 2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 3. Jaminan Kesehatan Nasional 4. Penuntasan TBC 5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah 3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi

No	ProSN	Proyek / Kegiatan
		4. Makanan Bergizi Gratis
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi 2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih 3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4. Industrilisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan) 5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1.	Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber – KTP)	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan sesuai standar ➤ Bebas Iuran BPJS untuk Kelas 3 dengan Berkat Plus	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan • Meningkatkan Layanan Primer Kesehatan dengan memperluas Ketersediaan Dokter Keluarga • Insentif Nakes terutama di daerah terpecil	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ✓ Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan di Daerah dengan Merevitalisasi Puskesmas	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
2.	Kesejahteraan & Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan sesuai standar ➤ MBG (Modul Bahan Gizi): Peningkatan nutrisi dan edukasi ➤ TTD (Tablet Tambah Darah): Pencegahan anemia pada ibu hamil	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2030

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal Periode RPJMD/ 2024	Target dan Capaian Setiap Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	74.26	74.48	74.71	74.94	75.17	75.4	75.63
2		Prevelensi Stunting	%	(Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek / Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB) x 100%	15,8	14,8	13,8	12,9	12,1	11,3	10,6
3	Sasaran I : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000	67,52	122	109	97	86	77	76

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal Periode RPJMD/ 2024	Target dan Capaian Setiap Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional *minimal 98% dari total penduduk	98	98,3	98,5	98,7	98,8	98,9	99
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi paripurna	%	Jumlah Fasilitas kesehatan (RS & Puskesmas) yang mendapatkan status akreditasi paripurna/	n/a	30	50	51	75	77,5	80
				Jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi dikali 100%							
6		Persentase Kab / Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki (RS & Puskesmas) sesuai standar dibagi Jumlah Kab / Kota dikali 100%	94,98	83	86	89	92	95	100
7		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	rasio	Jumlah Total tenaga kesehatan + medis yang teregistrasi dibagi total jumlah penduduk dikali 1.000	n/a	4,9	5	5,3	5,5	5,8	6,1
8		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	Jumlah fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar dibagi Jumlah total fasilitas kesehatan dikali 100%	n/a	83	86	89	92	95	100

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Awal Periode RPJMD/ 2024	Target dan Capaian Setiap Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1 dibagi 12 – Jumlah Indikator yang tidak ada di keluarga	0,342	0.342	0.345	0.347	0.350	0.352	0.355

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (%)	%	Jumlah Kab/Kota yang memiliki 90% dari 40 Jenis Obat esensial dan 7 Jenis Vaksin IRL dibagi seluruh Kab/Kota dikali 100	90	65	70	76	83	90	95	95
2	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai Standar	%	Jumlah Puskesmas teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, dikali 100	n/a	17	22	30	40	50	60	60
3	Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar	%	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar dibagi jumlah seluruh Puskesmas x 100	75	91	92	93	94	95	96	96

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	%	Jumlah Kab/Kota yang sudah STBM, dibagi dengan jumlah Kab/kota yang ada	97	5,8	11,7	17,6	23,5	35,3	41,2	47
5	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	Jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran IMT ≥ 27 , dibagi dengan jumlah penduduk umur >18 dikali 100	n/a	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
6	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	Total skor Indeks Kepuasan Pasien dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang dievaluasi dibagi jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang dievaluasi	n/a	77	78	79	79.5	80	81	81
7	Angka Keberhasilan pengobatan Tuberculosis (Treatment Success rate)	%	jumlah seluruh kasus tuberculosis yang dinyatakan sembuh dan pengobatan lengkap / seluruh kasus tuberculosis yang diobati pada periode waktu yang sama * 100%	88.43	90	90	90	90	90	90	90
8	Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	%	jumlah semua kasus TBC ditemukan yang dilaporkan / perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden) * 100%	63,21	90	90	90	90	90	90	90
9	Angka Kematian Bayi	/ 1000 Kelahiran hidup	jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dan dikali 1000.	4,14	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,5	655

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Angka Kematian Balita	/ 1000 Kelahiran hidup	(Jumlah kematian balita pada tahun tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama) × 1000	n/a	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,3	11,3
11	Jumlah Kab/kota yang mencapai Positive rate malaria <5%	Kab / Kota	Jumlah Kasus positif Malaria dibagi Total pemeriksaan suspek dikali 100%	n/a	17	17	17	17	17	17	17
12	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) minimal 95%	%	Jumlah kab/kota yang sudah mendapatkan imunisasi bayi lengkap (0-11 bulan) dibagi jumlah seluruh Kab/Kota dikali 100%	98,1	95	95	95	95	95	100	100
13	Angka Kematian (CFR) Dengue	%	Jumlah Kasus kematian akibat Dengue dibagi total kasus Dengue dikali 100%	0,59	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1
14	Persentase Lanjut Usia Mandiri	%	Jumlah lansia ≥ 60 tahun (skor ADL 20) ditambah jumlah lansia ≥ 60 tahun dengan ketergantungan ringan (skor ADL 12-19) dibagi jumlah lansia yang diskriminasi dikali 100%	74,30	75	77	79	81	83	86	86
15	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan pemantauan ibu hamil KEK	%	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan identifikasi KEK dan risiko KEK pada ibu hamil yang diukur LILA dan atau IMT dibagi Jumlah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi x 100%	8,2	40	50	60	70	80	90	90

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	%	Kab/Kota yang telah memiliki capaian 75% Posyandu memenuhi kriteria aktif melayani siklus hidup di dalam Kab/Kota tersebut dibagi total jumlah Kab/Kota, dikali 100%	25	30	50	60	70	80	90	90
17	Persentase Kab/Kota yang melakukan kampanye Kesehatan (pembudayaan hidup sehat)	%	Kab/Kota yang sudah melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas) dibagi seluruh kab/kota yang ada * 100%	n/a	30	40	50	60	70	80	90
18	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan.	%	Jumlah Posyandu yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan sesuai siklus hidup manusia dibagi jumlah posyandu dikali 100%	n/a	20	30	40	50	60	70	80
19	Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mengikuti peningkatan 25 kecakapan dasar kader	%	Jumlah kader posyandu bidang kesehatan telah mengikuti peningkatan keterampilan 25 kecakapan dasar kader (pengelolaan posyandu, layanan ibu, balita, usia sekolah, remaja, dewasa dan lansia) dibagi jumlah seluruh kader kali 100%	1	10	20	30	40	50	60	60

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80%	%	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis > 80% dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel yang melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dikali 100	n/a	30	60	70	80	85	90	90
21	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	%	Jumlah RS Pemerintah yang sudah ada 7 jenis dokter Spesialis dibagi Jumlah RS Pemerintah yang belum lengkap 7 jenis dokter Spesialis dikali 100	n/a	67	71	76	81	86	90	90
22	Persentase Kabupaten/kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan sesuai standar	%	Jumlah Kab/Kota Yang telah melaksanakan kredensial dibagi jumlah kab/kota dikali 100	n/a	29	47	58	70	82	100	100
23	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Puskesmas	%	Jumlah Kab/Kota (Data Puskesmas) Yang Melaporkan INM Setiap Bulan Dibagi Jumlah Kab/Kota Dikali 100	n/a	75	80	85	90	95	100	100
24	Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	%	Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki RS Pemerintah Dengan SPA minimal 60% dibagi Total RS Pemerintah di provinsi Sumsel dikali 100	98,83	70	75	80	85	90	95	95

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Persentase Kab/Kota dengan RS PONEK sesuai standar	%	Jumlah RS PONEK Kab/Kota dibagi kab/kota di kali 100	40	45	50	55	60	65	70	70
26	Jumlah kab/kota yang memenuhi rasio TT minimal 2:1000		Jumlah TT di seluruh RS yang ada di kab/kota dibagi jumlah penduduk di kab/kota dikali 500	n/a	3	4	5	6	6	6	6
27	Persentase Kab/ Kota yang memiliki klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas	%	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 20% klinik pratama dan praktek mandiri dokter berjejaring dengan Puskesmas untuk penguatan pelayanan program prioritas dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel dikali 100	n/a	20	30	40	50	60	70	70
28	Persentase Kab/Kota patuh dan lapor INM (Indikator Nasional Mutu) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	%	Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki Labkesmas Melaporkan INM Setiap Bulan Dibagi Jumlah Labkesmas di Provinsi Sumatera Selatan Dikali 100	n/a	75	80	85	90	95	100	100
29	Persentase UTD milik pemerintah dengan SPA sesuai standar	%	Jumlah Kab/Kota Yang Memiliki UTD Pemerintah Dengan SPA minimal 60% dibagi Total UTD Pemerintah di Provinsi Sumsel dikali 100	41	42	44	48	50	52	52	52

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Persentase fasyankes yang terdaftar ke SIKN	%	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 50% fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Labkes, TPMD/TPMDG) dengan status RME terdaftar di SIKN dibagi jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel dikali 100	n/a	50	55	60	65	70	75	75
31	Jumlah Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Unit	Jumlah Cabang PAK yang di kendalikan dan diawasi dalam periode 1 tahun	n/a	27	27	27	27	27	27	27
32	Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Unit	Jumlah PBF Cabang yang dibina dan diawasi dalam periode 1 tahun	n/a	14	18	22	26	30	35	35
33	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	Jumlah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman yang sesuai standar dibagi jumlah seluruh Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman kali 100%	n/a	25	30	35	40	45	50	50

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri	%	Jumlah Kab/Kota dengan kriteria min 50% Puskesmasnya melaksanakan pemantauan konsumsi TTD pada remaja putri sesuai standar dibagi jumlah seluruh kab/kota dikalikan 100	73,51	45	52	60	70	75	80	80
35	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan skrining kesehatan pada calon pengantin	%	Jumlah Kab/Kota dengan kriteria puskesmas yang catin individu (laki-laki/perempuan) yang mendapatkan pelayanan kespro catin di fasyankes dibagi Jumlah kabupaten/kota dikali 100%	n/a	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59	76,47	76,47
36	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan ANC 6 kali (K6)	%	Jumlah Kabupaten/kota dimana cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar pada kurun waktu tertentu di wilayah kerja > 90 dari jumlah ibu bersalin dibagi jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi) x 100%	87,9	80	82	85	88	90	85	136,155
37	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemberian suplementasi vitamin A pada balita usia 6-59 bulan	%	(Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan suplementasi vitamin A bulan Februari dan Agustus pada balita usia 6-59 bulan dengan cakupan minimal 85% dibagi jumlah seluruh Kab/Kota) x 100%	n/a	75,0	80,0	85,0	90,0	90,0	90,0	90,0

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar	%	Jumlah Kabupaten/kota yang cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar 95% dibagi jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi xham 100%	n/a	91	92	93	94	95	96	136.155
39	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan KB Pasca Persalinan	%	Jumlah Kab/Kota dengan kriteria puskesmas yang memberikan pelayanan kontrasepsi pasca persalinan pada PUS perempuan segera setelah melahirkan (0-42 hari pasca melahirkan) dibagi Jumlah kabupaten/kota dikali 100%	n/a	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59	76,47	76,47
40	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan Balita	%	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita sesuai standar (cakupan diatas 50%) dibagi Jumlah seluruh Kabupaten/kota dikali 100%	94	50	55	60	65	70	75	75
41	Persentase kab/kota melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan	%	(Jumlah Kab/Kota Yang melakukan pemantauan praktik MPASI pada 80% anak usia 6-23 bulan dibagi jumlah seluruh Kab/Kota) x 100%	91,6	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	35,0

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42	Persentase Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan konsumsi Suplementasi Gizi pada Ibu hamil	%	(Jumlah Kab/Kota Yang melaksanakan pemantauan ibu hamil yang mendapatkan suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah atau Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) dibagi jumlah seluruh Kab/Kota) x 100%	95,83	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	85,0
43	Persentase Kab/Kota dengan KK yang mencapai stop buang air besar sembarangan	%	Jumlah Kab/Kota yang telah Stop Buang Air Besar Sembarangan dibagi jumlah Kabupaten kota seluruhnya dikali 100%	97	90	93	95	97	100	100	100
44	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat	%	Jumlah sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumnya yang memenuhi standar (aman) dibagi dengan jumlah sarana air minum yang ada di wilayah dan waktu yang sama di kali 100%	76,86	80	84	88	92	96	100	100
45	Persentase Kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	%	Jumlah Pengolahan pangan yang memenuhi syarat di bagi jumlah seluruh Tempat Pengolaan Pangan yang ada pada wilayah tertentu di kali 100 %	73,45	68	74	78	84	88	94	94
46	Persentase Kab/kota dengan tempat fasilitas umum yang memenuhi syarat	%	Jumlah Tempat Fasiitas Umum yang memenuhi syarat dibagi jumlah seluh Tempat Fasiitas umun di wilayah tertentu dikali 100 %	79	80	85	90	95	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47	Jumlah Kab/ Kota yang menyelenggarakan Program Kab/ Kota Sehat	Kab/ Kota	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Kab/Kota Sehat	11	10	12	13	14	16	17	17
48	Persentase Kab/kota respon KLB / Wabah	%	Kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/Wabah sebesar 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	Jumlah ART usia 15 tahun ke atas yang saat ini mengalami gangguan depresi (menurut MINI) dibagi jumlah seluruh ART berumur ≥ 15 tahun	n/a	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
50	Persentase Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk	%	Jumlah Kab/kota yang mencapai target Discarded Rate Campak Rubella ≥ 2 per 100.000 penduduk dibagi jumlah seluruh Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	70,58	86	87	88	89	90	90	90
51	Persentase Kab/kota yang mencapai cakupan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) minimal 95%	%	Jumlah kab/kota yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap (12-23 bulan) dibagi jumlah seluruh Kab/Kota dikali 100%	n/a	95	95	95	95	95	100	100
52	Persentase Kab / Kota yang mencapai target kinerja Surveilans PD3I	%	Jumlah Kab/Kota yang mencapai minimal salah satu target NP AFP Rate ≥ 2 per 100.000 anak usia < 15 tahun atau discarded rate ≥ 2 per 100.000 populasi dibagi Jumlah seluruh Kab / Kota x 100%	n/a	86	87	88	89	90	91	91

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
53	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV	%	Jumlah orang dengan HIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan yang memulai terapi Antiretro virus (ART) dibagi jumlah orang dengan HIV yang baru ditemukan masuk dalam layanan tes dan pengobatan dalam kurun waktu tertentu dikali 100	72	90	90	90	90	90	90	90
54	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	Jumlah individu terdaftar untuk tata laksana hipertensi di fasilitas kesehatan dengan tekanan darah terkontrol < 140/90 mmHg pada kunjungan klinis terakhir (tidak termasuk yang baru didiagnosis dengan masa pengobatan kurang dari 3 bulan pada periode pelaporan) dibagi jumlah individu yang ditatalaksana hipertensi yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah	n/a	20	25	30	35	40	45	45
55	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan skrining DM > 60%	Kab / Kota	Jumlah Kab/Kota yang melakukan deteksi dini DM.	n/a	2	4	6	8	10	12	12

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
56	Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPsesuai protokol	%	Jumlah perempuan usia 30-69 tahun dengan hasil pemeriksaan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi /PAPs sesuai protokol dibagi dengan pembagiannya adalah jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	n/a	30	50	65	80	90	100	100
57	Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun	%	Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dibagi jumlah semua penduduk umur 10-21 tahun dikali 100%	n/a	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4	7,4
58	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	%	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100
59	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	Jumlah Semua masyarakat yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sebesar 100%	100	100	100	100	100	100	100	100
60	Jumlah Kab/ Kota Eliminasi Kusta	Kab / Kota	Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun, tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun	n/a	1	2	3	4	5	6	6

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61	Persentase Kab/kota yang mencapai kepesertaan aktif JKN	%	Jumlah Kabupaten/Kota dengan kepesertaan aktif minimal 80%	n/a	94	94	94	100	100	100	100
62	Persentase kab kota yang memiliki kader posyandu bidang kesehatan strata madya	%	Jumlah kader Posyandu telah mengikuti ketrampilan dasar dan lulus minimal 4 kelompok ketrampilan di bagi jumlah seluruh kader posyandu * 100%	n/a	10	20	30	40	50	50	50
63	Persentase kab/kota yang melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional	%	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 15% Puskesmas melakukan pembinaan kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional, dibagi jumlah seluruh kab/kota di Provinsi Sumsel, dikali 100	69,14	60	65	70	80	90	100	100
64	Persentase Kab/ Kota yang memiliki Kebijakan meningkatkan aktivitas fisik	%	Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki kebijakan aktivitas fisik dibagi jumlah seluruh kab/kota x 100%	n/a	50	60	60	75	85	90	100
65	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok usia dewasa	%	Jumlah kab/kota dengan capaian pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% pada kelompok usia dewasa, dibagi jumlah seluruh kab/kota di Provinsi Sumsel, dikali 100	n/a	30	60	70	80	85	90	90

No	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target dan Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66	Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan pemeriksaan Kesehatan gratis > 80% pada kelompok lanjut usia	%	Jumlah kab/kota dengan capaian pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis >80% pada kelompok lanjut usia, dibagi jumlah seluruh kab/kota di Provinsi Sumsel, dikali 100	n/a	30	35	40	45	50	55	55
67	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	Jumlah peserta yang ditingkatkan kompetensinya pada pelatihan terakreditasi dengan jumlah total peserta pelatihan kali 100%	n/a	70	80	100	100	100	100	100
68	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	Jumlah PBF Cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan dibagi Total jumlah PBF Cabang x 100%	n/a	75	80	85	90	95	100	100
69	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi & pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti dibagi Total Jumlah rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi & pangan olahan dari lintas sektor x 100%	n/a	70	75	80	85	90	95	95

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini menjabarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjadi arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam lima tahun (2025-2029). Renstra ini memuat masalah dan isu strategis dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan serta bagaimana mencapainya agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman dan rujukan dalam penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029.

Renstra ini tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (uncertainty), dan perbaikan terus-menerus.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) komunikasi dan konsultasi, dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal; 2) identifikasi risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan sumber risiko, dan konsekuensi dari risiko yang dapat menghambat pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ; 3) analisis risiko dengan menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; 4) evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan upaya untuk mengatasi risiko; 5) mitigasi risiko dilakukan dengan mencari alternatif mitigasi risiko yang terbaik, menyusun rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi risiko, dan 6) pemantauan dan review terhadap seluruh aspek proses manajemen risiko.

Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, Dinas Kesehatan melakukan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi :

1) Gender dan inklusi sosial

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan kesehatan yang disediakan dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan marginal. Dalam konteks gender dan inklusi sosial, Dinas Kesehatan dapat berperan dalam :

- Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, contoh ; Persentase RS memberikan layanan ramah penyandang disabilitas
- Mengurangi kesenjangan kesehatan, dalam hal ini laki-laki dan perempuan dan kelompok sosial yang berbeda
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, terutama bagi kelompok yang rentan dan marginal, contoh

Workshop Lansia Sehat dan Mandiri dan Pendampingan Ibu Hamil
Resiko Tinggi pada Kab/Kota dengan Jumlah AKI dan AKB Tinggi

2) Pembangunan berkelanjutan

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program kesehatan primer dan berkelanjutan seperti ; Berobat ber – KTP, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Program Makanan Bergizi Gratis
- Mengurangi dampak lingkungan terhadap kesehatan seperti; polusi udara dan air
- Mengintegrasikan kesehatan dalam pembangunan sehingga kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.

3) Transformasi digital

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam transformasi digital, antara lain:

- Meningkatkan efisiensi layanan kesehatan seperti penggunaan sistem informasi kesehatan, telemedis atau Sistem Informasi Rumah Sakit
- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan seperti layanan kesehatan online dan aplikasi kesehatan (dalam hal ini PSC 119)
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan seperti penggunaan media sosial (Instagram Dinas Kesehatan) dan aplikasi kesehatan (PSC 119)

4) Pembangunan rendah karbon

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan rendah karbon, antara lain:

- Mengurangi dampak lingkungan seperti mengurangi penggunaan energi dan limbah medis (melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Fasilitas kesehatan atau dengan penggunaan aplikasi Sikelim)
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan rendah karbon dan cara-cara untuk mengurangi dampak lingkungan.

5) Pembangunan berketahanan iklim

Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan berketahanan iklim, antara lain ;

- Meningkatkan kesiapsiagaan bencana terkait perubahan iklim seperti banjir, kebakaran hutan dan Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan memberikan obat-obatan dan bahan medis lain, Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak-anak (PMBA) dll dan Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)
- Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan terhadap dampak perubahan iklim seperti meningkatkan infrastruktur kesehatan dan kapasitas sumber daya manusia (dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kesehatan jiwa, tenaga penyuluh/ promosi kesehatan).

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mempercepat terwujudnya derajat kesehatan masyarakat menuju Sumatera Selatan yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berdaya saing.

Palembang, 29 September 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman, M.Kes, SpKKLP
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660909 200604 1 008